

**ANALISIS PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PDRB  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2006-2015  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam

**Oleh :**

**ENI ERVIANA**

**NPM : 1451010177**

**Program Studi : Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1439 H / 2018 M**

**ANALISIS PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PDRB  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2006-2015  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam**



**Pembimbing I : Prof.Dr.H.Suharto,SH.,MA  
Pembimbing II : Femei Purnamasari,SE.,M.Si**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1440/2018M**

## ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari penerimaan pajak, retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah. Pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di dominasi oleh kontribusi penerimaan pajak dan retribusi. Di Kota Bandar Lampung kontribusi penerimaan daerah masih di dominasi oleh dana perimbangan yaitu dana transferan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yaitu sebesar 55% dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar 21% pada tahun 2015. Kecilnya kemampuan PAD dalam menyumbang kepada penerimaan daerah menunjukkan bahwa belum optimalnya pengelolaan potensi PAD oleh pemerintah daerah Kota Bandar Lampung. Untuk mengetahui potensi sumber-sumber PAD dibutuhkan pengetahuan tentang analisis perkembangan beberapa indikator makro ekonomi diantaranya Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi. Dimana peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah dapat menentukan tingkat PAD oleh suatu daerah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : a). Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandar Lampung tahun 2006-2015?. b). Bagaimana pengaruh PDRB terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandar Lampung tahun 2006-2015?. c). Bagaimana Pengeluaran Pemerintah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Tahun 2006-2015 dalam Perspektif Ekonomi Islam?.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dalam periode pengamatan 2006-2015. Pengumpulan data Pengeluaran Pemerintah, PDRB dan PAD di dapat dari BPS.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu : a). Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). b). PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). c). Ditinjau dari perspektif ekonomi islam bahwa pengeluaran pemerintah dan PAD diperbolehkan sebagaimana telah dijelaskan pada Surat At-Taubah : 29 dan Al-Baqarah : 43.

Kata kunci : Pengeluaran Pemerintah, PDRB, Pendapatan Asli Daerah (PAD)





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **Analisis Pengeluaran Pemerintah Dan PDRB Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Tahun 2006-2015 Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Nama Mahasiswa : **Eni Erviana**  
NPM : **1451010177**  
Program Studi : **Ekonomi Syaria'ah**  
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, November 2018

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A.**  
**NIP. 195304231980031003**

**Femei Purnamasari, S.E., M.Si**  
**NIP. 198405212015032004**

**Mengetahui,**  
**Ketua Jurusan**

**Madnasir, S.E., M.Si**  
**NIP. 197504242002121001**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarama, Bandar Lampung (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Analisis Pengeluaran Pemerintah Dan PDRB Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Tahun 2006-2015**  
Dalam Perspektif Ekonomi Islam, disusun oleh : **Eni Erviana, NPM: 1451010177**, Jurusan : **Ekonomi Syaria'h**, telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada  
Hari/Tanggal : **Senin, 12 November 2018.**

**TIM MUNAQASAH**

Ketua : **Drs. H. M. Nasruddin, M.Ag**

Penguji 1 : **Dr. Erike Anggraini, S.E., M. E. Sy**

Penguji 2 : **Prof. Dr. H. Suharto, S. H., M.A**

Sekretaris : **Rosydalina Putri, S.E., M.S.Ak, Akt**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag**  
**NIP. 195808241989031003**



## MOTTO

﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَنْقُومِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنشَأَكُمْ

مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾

Artinya : “dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya[726], karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)." (Q.S HUD (11) : 61)



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur Kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam, penulis mempersembahkan karya tulis ini kepada orang-orang terkasih, terutama untuk Kedua Orang Tua saya Bapak Siman dan Ibu Sani yang saya hormati dan saya banggakan. Selalu menguatkan saya sepenuh jiwa raga, merawat, dan memotivasi saya dengan nasehat-nasehat yang luar biasa, serta mendoakan saya agar selalu ada dalam jalan-Nya. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan keberkahan dalam setiap langkahnya.

1. Terima kasih Untuk Orang Terkasihku yang selalu memberi suport dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
2. Kedua kakak saya dan Adik saya, Hendra, Hendri dan Husnita Rani yang senantiasa selalu memberi semangat dan mendoakan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Almamaterku tercinta tempat saya menimba ilmu yaitu UIN Raden Intan Lampung, semoga selalu jaya, maju dan berkualitas.
4. Teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Islam angkatan 2014 terutama yang telah membantu saya menyelesaikan skripsi ini saudari Nurlela S.E, Putri Andini S.E, Lilis Istiqomah S.E, Fadilatuh Inayah S.E, Tirani Suryanti S.E, Savarita Pitri S.E dan Cindy Dwi Primavera S.E, Winda Ria Melati S.Pd, Oktarina Wulandari S.E yang tak henti-hentinya memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Eni Erviana, dilahirkan di Daya Sakti, pada tanggal 27 November 1995, penulis ini merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Siman dan Ibu Sani. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu:

1. Pendidikan dimulai dari TK Dharma Wanita pada Tahun 2000 – 2001
2. SDN 02 Gunung Timbul pada Tahun 2001 – 2007
3. SMPN 02 Tumijajar pada Tahun 2007 – 2010
4. SMA PGRI 01 Tumijajar pada Tahun 2010 – 2013
5. Pada Tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil program studi Ekonomi Syari'ah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.





## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi ini dengan judul **“ANALISIS PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PDRB TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2006-2015 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu S1 Jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan, kerjasama, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai islami.
2. Bapak Dr. Moh. Bahrudin, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.

3. Bapak Madnasir, S.E., M.Si selaku ketua jurusan dan Deki Fermansyah, S.E., M.Si selaku sekretaris jurusan Ekonomi Syari'ah senantiasa sabar dalam memberikan arahan serta motivasi kepada penulis hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Suharto, SH., MA selaku pembimbing I yang telah meluangkan banyak waktunya untuk mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Ibu Femei Purnamasari, SE., M.Si selaku pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktunya untuk mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.
6. Bapak dan Ibu Dosen karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden, Intan Lampung yang telah memberikan ilmu serta motivasi yang bermanfaat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi.
7. Pimpinan dan Karyawan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institus, serta perpustakaan Daerah yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
8. Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data-data penelitian serta memberikan penjelasan mengenai data-data tersebut.

9. Sahabat seperjuangan khususnya kelas C, Jurusan Ekonomi Syari'ah, angkatan 2014 yang selalu bersama selama proses perkuliahan serta memberi dukungan, semangat, dan bantuan dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat terbaik yang telah membantu dan memberi semangat kepada penulis, yaitu Cindy Dwi Primavera, Nurlela, Putri Andini, Lilis Istiqomah, Oktarina Wulandari dan Winda Ria Melati terimakasih atas dukungannya selama ini.

Peneliti ini menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan waktu, dana, kemampuan yang peneliti miliki.

Untuk itu para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi hasil penelitian ini.

Peneliti berharap hasil penelitian ini akan menjadi sumbangan yang berarti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Khususnya ilmu-ilmu ke Islaman di abad Modern.

Bandar Lampung, September 2018

Penulis

**Eni Erviana**  
**NPM. 1451010177**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang .....	5
D. Batasan Masalah.....	19
E. Rumusan Masalah.....	20
F. Hipotesis.....	20
G. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian .....	22
H. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	22
I. Kerangka Pemikiran.....	25

## **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Pendapatan Dan Pengeluaran Dalam Ekonomi Islam	
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Ekonomi Islam .....	28
a. Sumber-Sumber Pendapatan Negara Zaman Rasulullah SAW .....	30
2. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	34
a. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	35
3. Konsep Pengeluaran Pemerintah	
a. Pengertian Pengeluaran Pemerintah Dalam Ekonomi Islam.....	43
b. Pengertian Pengeluaran Pemerintah.....	47
c. Teori-Teori Pengeluaran Pemerintah .....	48
d. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	51
4. Konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	
a. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ....	53
b. Metode Perhitungan PDRB .....	54
c. Sumber-Sumber PDRB.....	57
d. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	58

## **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Dan Sifat Penelitian .....	61
B. Jenis Dan Sumber Data Penelitian.....	62
C. Teknik Pengumpulan Data .....	62
D. Definisi Operasional .....	64
E. Metode Analisis Data .....	65

## **BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

### **A. Penyajian Data**

1. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian.....70
  - a. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung..... 70
  - b. Topografi.....72
  - c. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung .....74
2. Sarana Prasarana Kota Bandar Lampung .....75
3. Gambaran Hasil Penelitian
  - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....79
  - b. Total PDRB .....81
  - c. Pengeluaran Pemerintah .....83

### **B. Analisis data**

1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Tahun 2006-2015 .....87
2. Pengaruh PDRB Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Tahun 2006-2015 .....96
3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan PDRB pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Tahun 2006-2015 Dalam Perspektif Ekonomi Islam.....100

## **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan .....107
- B. Saran .....108

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pengeluaran pemerintah, PDRB dan PAD Kota Bandar Lampung (2006-2015).....	11
Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Daerah Kota Bandar Lampung T.A. 2010 sampai T.A 2015 .....	13
Tabel 4.1 Daftar walikota bandar lampung beserta periode jabatan.....	72
Tabel 4.2 Jumlah fasilitas pendidikan .....	76
Tabel 4.3 Jumlah fasilitas kesehatan .....	78
Tabel 4.4 Total realisasi penerimaan pendapatan asli daerah kota bandar lampung Tahun 2006-2015 (dalam rupiah).....	80
Tabel 4.5 Total PDRB kota bandar lampung atas dasar harga konstan 2000 Tahun 2006-2015 (juta rupiah).....	82
Tabel 4.6 Total pengeluaran pemerintah kota bandar lampung Tahun 2006-2015 (dalam rupiah) .....	84
Tabel 4.7 Data Olah Regresi Berganda .....	86
Tabel 4.8 Hasil uji normalitas Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bandar Lampung.....	87
Tabel 4.9 Hasil uji multikolienaritas Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bandar Lampung.....	88
Tabel 4.10 Hasil uji autokorelasi Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bandar Lampung.....	89
Tabel 4.11 Hasil uji heteroskedastisitas Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bandar Lampung.....	89
Tabel 4.12 Hasil uji regresi linear berganda.....	90

Tabel 4.13 Hasil uji T untuk Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	92
Tabel 4.14 Hasil uji F untuk Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	94
Tabel 4.15 Total penerimaan PAD dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Bandar Lampung Tahun 2006-2015 (dalam rupiah).....	98



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran.....	27
Gambar 2.1 Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah.....	50
Gambar 4.1 Grafik Perbandingan Kontribusi Antara Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD di Kota Bandar Lampung.....	99





## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 berita acara seminar proposal

Lampiran 2 SK pembimbing

Lampiran 3 Kartu Konsultasi Skripsi

Lampiran 4 hasil output uji asumsi klasik

Lampiran 5 hasil output evIEWS regresi berganda

Lampiran 6 tabel uji F Tabel

Lampiran 7 tabel uji T Tabel

Lampiran 8 Produk Domestik Regional Bruto ADHK 2000 Kota  
Bandar Lampung tahun 2006-2015

Lampiran 9 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung Tahun 2006-2015

Lampiran 10 Berita Acara Munaqasyah

Lampiran 11 Surat Pernyataan Tidak Plagiat



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Judul penelitian yang akan penulis susun ini adalah “**ANALISIS PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PDRB TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2006-2015 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**” untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang ada didalamnya. Adapun istilah-istilah yang perlu mendapat penjelasan adalah sebagai berikut:

1. **Analisis** adalah proses pencarian jalan keluar (pemecahan masalah) yang berangkat dari dugaan akan kebenarannya atau penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.<sup>1</sup>
2. **Pengeluaran Pemerintah** adalah keseluruhan pengertian yang dilakukan yaitu pengeluaran meliputi konsumsi dan investasi.<sup>2</sup>
3. **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)** didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari sektor perekonomian di wilayah itu.<sup>3</sup> PDRB yang digunakan dalam penelitian ini

---

<sup>1</sup> Ahmad A.K. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, 2006, h. 44

<sup>2</sup> Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Makro Ekonomi, Edisi Ketiga*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 192

<sup>3</sup> Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2005), h. 18

adalah PDRB atas harga konstan dimana dengan PDRB harga konstan ini digunakan untuk menunjukan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan struktur ekonomi wilayah.

**4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)** adalah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang dipisahkan dan lain-lain.<sup>4</sup>

**5. Ekonomi Islam** adalah Suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang islami.<sup>5</sup>

Secara keseluruhan penjelasan dari judul penelitian ini “**Analisis Pengeluaran Pemerintah dan PDRB Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Tahun 2006-2015 Dalam Perspektif Ekonomi Islam**” adalah menganalisis bagaimana pengaruh variabel-variabel makro ekonomi yaitu Pengeluaran Pemerintah dan PDRB terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Tahun 2006-2015 Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

---

<sup>4</sup> Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta : Salemba Empat, 2012), h. 101

<sup>5</sup> P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers. 2011), h. 17

## B. Alasan Memilih Judul

Adapun dipilihnya judul ini, yaitu dengan alasan sebagai berikut :

### 1. Secara Objektif

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 yang menjelaskan bahwa Penerimaan Asli Daerah (PAD) dalam pelaksanaan desentralisasi bersumber dari :

#### a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mendukung kemampuan keuangan daerah.<sup>6</sup>

#### b. Dana Perimbangan

Nordiawan berpendapat bahwa Dana Perimbangan merupakan salah satu komponen pendapatan yang cukup penting. Banyak pemda yang masih mengandalkan sumber pendapatan ini karena jumlah PAD nya yang kurang mencukupi untuk menutup anggaran belanjanya.<sup>7</sup>

#### c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Penerimaan ini

---

<sup>6</sup> Abid Muhtarom, "Analisis PAD (Pendapatan Asli Daerah) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2010-2015", Jurnal Ekonomi Universitas Islam Lamongan, Vol. XIII, No. 1 (2015), h. 660

<sup>7</sup> Nurdiwaty Diah, Badrus Zaman, Efda Kristinawati, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Modal di Jawa Timur", Jurnal Aplikasi Bisnis, Vol. 17, No. 1 (2017), h. 50

berasal dari hasil penjualan barang milik daerah, dan penerimaan jasa giro.<sup>8</sup>

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dijadikan indikator untuk menilai tingkat kemandirian keuangan suatu daerah dalam membiayai pembangunan ekonomi daerahnya. Di Kota Bandar Lampung kontribusi penerimaan daerahnya masih didominasi oleh dana perimbangan yaitu dana transferan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yaitu sebesar 55% dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar 21% pada tahun 2015.

Kecilnya kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menyumbang kepada penerimaan daerah menandakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung belum memberikan kontribusi secara signifikan terhadap APBD. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung secara optimal belum secara optimal menggali potensi PAD. Untuk mengetahui potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibutuhkan pengetahuan tentang analisis perkembangan pada indikator Pengeluaran Pemerintah. Besarnya Pengeluaran Pemerintah ini dapat menentukan tingkat PAD yang diperoleh suatu daerah. Pengeluaran pemerintah secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam tahun 2006-2015.

---

<sup>8</sup> Abdul Halim, "Akuntansi Keuangan Daerah", Jakarta, 2001, h. 45



## 2. Alasan Subjektif

Memberikan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca tentang analisis pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam dan juga dari aspek yang penulis bahas, permasalahan tersebut sangat memungkinkan untuk dibahas atau diteliti.

## C. Latar Belakang

Pembangunan Nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia, dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju dan kukuh kekuatan moral dan etika.<sup>9</sup> Kebijakan pembangunan nasional diarahkan kepada pembangunan yang merata di setiap daerah. Adanya kebijakan pembangunan nasional, pemerintah daerah dituntut agar lebih bisa mandiri dalam mengelola keuangan daerah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi daerah.<sup>10</sup>

Pembangunan ekonomi daerah dilaksanakan berdasarkan dengan kemampuan daerah masing-masing dengan cara memanfaatkan sumber daya yang tersedia sehingga dapat mendorong peningkatan keuangan daerah.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah

---

<sup>9</sup> Ida Bagus Gede Wirakusuma dkk, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabanan" Jurnal Ilmiah Ekonomi Universitas Tabanan, Vol. 13 No. 1 (2016), h. 69, *Universitastababn.ac.id*

<sup>10</sup> Ian Dwi Heruyanto, "Analisis Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta", (Skripsi Program studi Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016), h. 22, *diglib.uin-suka.ac.id*

dan masyarakatnya bersinergi dalam mengelola setiap sumber daya yang ada serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.<sup>11</sup>

Perwujudan dari pembangunan daerah di Indonesia ditandai dengan diberlakukannya Otonomi Daerah yang dijalankan melalui prinsip desentralisasi yakni pemerintah daerah diberi kebebasan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.<sup>12</sup> Keberhasilan penyelenggaraan Otonomi Daerah tidak dapat dilepaskan dari cukup tidaknya kemampuan daerah dalam bidang keuangan, karena kemampuan keuangan ini merupakan indikator penting guna mengukur tingkat otonomi daerah. Hal ini mudah dipahami, karena mustahil bagi daerah-daerah dapat menjalankan berbagai tugas dan pekerjaan dengan efektif dan dapat melaksanakan pelayanan dan pembangunan bagi masyarakatnya tanpa tersedianya keuangan daerah. Sumber-sumber keuangan daerah dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok utama yakni : sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber pendapatan non-asli daerah (non PAD).

---

<sup>11</sup> Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2015), h. 374

<sup>12</sup> Ikhwan Bukhari, "Analisis Perbandingan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah" *Jurnal Akuntansi Universal Siliwangi* (2010), h. 3, *academia.edu.ac.id*

Penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat hanya tercapai apabila sumber utama keuangan daerah guna membiayai aktifitas daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau paling tidak pembiayaan rutinnya (Pengeluaran pemerintah) ditutup oleh hasil PAD.<sup>13</sup> Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah mempunyai hubungan yang erat karena dengan Pengeluaran Pemerintah juga akan mempengaruhi naik turunnya jumlah pendapatan asli daerah dengan demikian pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga akan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi daerah karena peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah juga dapat dilihat dari besar kecilnya PDRB suatu daerah tersebut.

Era Otonom Daerah menuntut setiap pemerintah daerah untuk mandiri dan kreatif mencari sumber-sumber pembiayaan serta aktif mencari berbagai peluang yang bisa dijadikan sumber pemasukan kas daerah.

Perwujudan dari pembangunan daerah di Indonesia ditandai dengan diberlakukannya Otonomi Daerah yang dijalankan melalui prinsip desentralisasi yakni pemerintah daerah diberi kebebasan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.<sup>14</sup> Era Otonom Daerah menuntut setiap pemerintah daerah untuk mandiri dan kreatif mencari sumber-sumber pembiayaan serta aktif mencari berbagai peluang yang bisa dijadikan sumber

---

<sup>13</sup>Kaho Josep Riwu, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhinya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 283.

<sup>14</sup> Ikhwan Bukhari, "Analisis Perbandingan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah" *Jurnal Akuntansi Universal Siliwangi* (2010), h. 3, *academia.edu.ac.id*

pemasukan kas daerah. Otonom Daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>15</sup> Otonomi Daerah dipandang sebagai suatu kebijakan yang sangat demokratis dan memenuhi aspek dari desentralisasi yang sesungguhnya.

Penjelasan dalam UU No 32 Tahun 2004 mengungkapkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>16</sup> Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang dilimpahkan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta peraturan pemerintah pendukungnya.

Ketentuan yang ada dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi bersumber dari : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan.<sup>17</sup>

Dukungan keuangan merupakan salah satu faktor penting bagi pemerintah daerah dalam menjalankan atau mengurus rumah tangganya.

---

<sup>15</sup> Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi, *Op. Cit.*, h. 1

<sup>16</sup> UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat 7, [www.itjen.depkes.go.id](http://www.itjen.depkes.go.id)

<sup>17</sup> UU Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 2, [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)

Dalam pemerintah daerah dukungan keuangan tersebut dapat diperoleh dari pendapatan asli daerah.<sup>18</sup> Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator dalam mengukur tingkat kemandirian suatu daerah otonom dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan dan pembangunan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>19</sup> Proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah.<sup>20</sup>

Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat menjadi modal utama bagi penyelenggara pemerintahan dan pembangunan, pada saat ini kondisinya masih kurang memadai, artinya bahwa proporsi yang disumbangkan PAD terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) masih relatif rendah.<sup>21</sup>

Isyarat bahwa Pendapatan Asli Daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan Otonomi Daerah menunjukkan bahwa PAD merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam

---

<sup>18</sup> Yeny Kurniawati Gitaningtyas, Taufik Kurrohman, "Pengaruh Produk Domestic Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Dan Investasi Swasta Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur", Artikel Ilmiah Mahasiswa Universitas Jember, (2014), h. 1, [Repository.unej.ac.id](http://Repository.unej.ac.id)

<sup>19</sup> Aries Djaenuri, *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Elemen-Elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*, (Bogor :Ghalia Indonesia, 2012), h. 88

<sup>20</sup> Ali Chakim, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun Tahun 1991-2010"(Thesis Program studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2011), h. 3, <http://digilib.uns.ac.id>

<sup>21</sup> Miragustia Mayza, Raja Masbar, Muhammad Nasir, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh" Jurnal Ilmu Ekonoi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol. 3, No. 1 (2015), h. 9, [jurnal.uinsyah.ac.id](http://jurnal.uinsyah.ac.id)



menyelenggarakan dan mewujudkan Otonom Daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap struktur APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.<sup>22</sup> Besarnya Pertumbuhan Ekonomi daerah seharusnya merupakan sebuah peluang yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong perekonomian daerah.<sup>23</sup> Pada kenyataannya di Indonesia masih banyak kabupaten/kota di Indonesia yang kontribusi PAD terhadap total APBD masih rendah dan lebih di dominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat.

Setiap daerah berlomba-lomba untuk dapat meningkatkan perekonomian daerahnya sendiri termasuk meningkatkan perolehan pendapatan asli daerah. Meskipun daerah memiliki sumber daya alam yang melimpah namun masih banyak juga sumber daya alam yang belum dimanfaatkan.<sup>24</sup> Kota Bandar Lampung merupakan salah satu kota dari Provinsi Lampung yang mana memiliki potensi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar. Meskipun sudah berlakunya kebijakan desentralisasi dan Otonomi daerah, tetapi pada kenyataannya kinerja keuangan daerah kota Bandar

---

<sup>22</sup> Abdullah, Dri Asmawati, dan Febriansyah, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Bagian Selatan" *Jurnal Akuntansi FEB Universitas Bengkulu*, Vol 3, No. 1, (2015), h. 42, <http://jafebunib.ac.id>

<sup>23</sup> Putu Lia Perdana Sari, "Analisis Vaariabel-Variabel yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali" *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol 2, No. 3, (2013), h. 716, [ejurnal.undiksha.ac.id](http://ejurnal.undiksha.ac.id)

<sup>24</sup> Aisyah Kamila, "Pengaruh sektor pariwisata, Produk Domestik regional Bruto (PDRB), Tingkat Investasi dan Jumlah Penduduk Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2010-2014" (Skripsi program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), h. 2, [eprints.ums.ac.id](http://eprints.ums.ac.id)

Lampung belum dapat dikatakan mandiri. Hal ini terlihat dari data realisasi penerimaan Daerah Kota Bandar Lampung pada tahun 2006-2015

**Tabel 1.1**  
**Pengeluaran pemerintah, PDRB dan PAD Kota Bandar Lampung**  
**(Dalam rupiah)**

Tahun	Pengeluaran Pemerintah	PDRB	PAD
2006	564.988.592.643	5.079.047	46.137.259.170
2007	652.956.782.605	5.426.158	53.714.914.762
2008	778.777.514.052	5.802.307	67.661.519.022
2009	802.095.631.362	6.151.068	70.432.264.168
2010	928.170.641.481	6.540.521	86.692.399.700
2011	1.154.628.593.735	6.967.851	162.772.590.332
2012	1.464.988.926.884	7.423.369	298.696.062.085
2013	1.779.859.865.268	7.905.567	360.698.350.131
2014	1.779.475.905.415	8.475.205	394.646.889.446
2015	1.757.419.863.235	9.010.634	397.547.326.856

*Sumber : data diolah dari BPS Provinsi Lampung tahun 2018.*

Berdasarkan data diatas maka dapat diketahui bahwa Pengeluaran Pemerintah itu sendiri digunakan untuk melihat besarnya biaya pembelanjaan yang dilakukan pemerintah dalam melakukan pembangunan ekonomi. Dari tabel diatas dapat diketahui besarnya pengeluaran pemerintah kota Bandar lampung dari tahun ketahun mengalami naik turun atau fluktuatif, pada tahun 2006 sampai dengan 2015 Pengeluaran Pemerintah tertinggi terjadi pada tahun 2013 dan 2014 sebesar 1.779.859.865.268 dan 1.779.475.905.415,

tingginya Pengeluaran Pemerintah ini disebabkan oleh banyaknya biaya pembangunan yang dilakukan Kota Bandar Lampung. Namun pada tahun 2015 dan 2016 Pengeluaran Pemerintah dapat ditekan sedemikian rupa sehingga mengalami rendahnya Pengeluaran Pemerintah dengan demikian tingginya atau rendahnya Pengeluaran Pemerintah akan mempengaruhi pada Pendapatan Asli Daerah.

Tabel diatas menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah Kota Bandar Lampung mengalami penekanan penurunan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memberikan dampak positif pada Pendapatan Asli Daerah. Dengan Pengeluaran Pemerintah yang dapat ditekan sedikit mungkin maka sesuai dengan data Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini juga dipengaruhi oleh besarnya PDRB Kota Bandar Lampung.

Pengeluaran Pemerintah Kota Bandar Lampung dari tahun 2006-2015 mengalami peningkatan yang artinya dengan peningkatan pengeluaran pemerintah maka akan mengurangi jumlah Pendapatan Asli Daerah dan PDRB Kota Bandar Lampung pada tahun 2006-2015 mengalami peningkatan. Dengan peningkatan PDRB tersebut akan menambah Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung hal ini terealisasi sesuai dengan data yang ada, namun berdasarkan LKPJM AMJ Wali kota bandar lampung tahun 2016 bahwa meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung tidak membuat kota tersebut menjadi daerah yang mandiri dalam membiayai pembangunan

daerah hal ini didukung oleh data dimana pendapatan penerimaan daerah Kota Bandar Lampung masih didominasi oleh dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal ini penerimaan daerah Kota Bandar Lampung sangat didominasi oleh penerimaan dana perimbangan yang merupakan dana transferan pemerintah pusat. Hal ini dapat dibuktikan dari tabel 1.2 dibawah ini :

**Tabel 1.2**  
**Realisasi Penerimaan Daerah Kota Bandar Lampung**  
**T.A. 2010 sampai T.A 2015**

Tahun	PAD (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (Rp)
2010	86.692.399.700	672.078.484.491	200.298.498.120
2011	162.772.590.332	747.009.425.171	278.043.959.428
2012	298.696.062.085	901.841.182.094	258.934.612.138
2013	360.698.350.131	992.894.943.895	334.818.996.713
2014	394.646.889.446	1.039.433.426.630	401.924.331.038
2015	397.547.326.856	1.016.422.749.268	429.570.598.469

*Sumber : LKPJM AMJ Walikota Bandar Lampung Tahun 2010-2015*

Tabel diatas menjelaskan bahwa Penerimaan Daerah Kota Bandar Lampung masih didominasi oleh Dana Perimbangan dan Dana Lain-Lain Pendapatan daerah. Hal ini meningkatnya Pendapatan Asli Daerah belum menjadikan Pendapatan Asli Daerah sebagai kekuatan atau penerimaan utama padahal setiap tahunnya Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Umdatul dengan Hasil penelitian yang didapat menunjukan secara parsial bahwa variabel PDRB, Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap PAD, inflasi tidak mempengaruhi PAD di kota se Jawa Tengah. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Triani dan Yeni Kuntari dengan Hasil penelitian menunjukan bahwa PDRB berpengaruh negatif karena kontribusi pajak dan retribusi daerah dalam penyusunan PAD mengalami penurunan, namun PDRB selalu mengikat tiap tahunnya. Secara statistik jumlah penduduk berpengaruh positif, dan inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan PAD.

Penelitian yang dilakukan oleh Umdatul, Triani dan Yenni Kuntari dapat diartikan bahwa pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah dan PDRB, dimana sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh kaho bahwa Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari cukup tidaknya kemampuan daerah dalam bidang keuangan, karena kemampuan keuangan ini merupakan indikator penting guna mengukur tingkat otonomi daerah. Hal ini mudah dipahami, karena adalah mustahil bagi daerah-daerah dapat menjalankan berbagai tugas dan pekerjaan dengan efektif dan dapat melaksanakan pelayanan dan pembangunan bagi masyarakatnya tanpa tersedianya untuk itu.

Sumber-sumber keuangan daerah dapat dikelompok kedalam kedua kelompok utama yakni : sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber



pendapatan non-asli daerah (non PAD). Penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat hanya tercapai apabila sumber utama keuangan daerah guna membiayai aktifitas daerah berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) atau paling tidak pembiayaan rutinnya ditutup oleh hasil PAD.<sup>25</sup>

Tercatat pada tahun 2010 kontribusi penerimaan daerah Kota Bandar Lampung di dominasi oleh Dana Perimbangan sebesar 70%, lalu Pendapatan Asli Daerah sebesar 9% dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar 21%. Pada Tahun 2015 kontribusi Pendapatan Asli Daerah meningkat menjadi 21%, tetapi penerimaan dari Dana Perimbangan masih tertinggi yaitu sebesar 55% dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar 23%.<sup>26</sup>

Kecilnya kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menyumbang kepada Penerimaan Daerah menandakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung belum dapat memberikan kontribusi secara signifikan terhadap APBD. Dengan demikian, maka perlu dicari potensi-potensi daerah untuk meningkatkan PAD dari pajak, Retribusi, Laba BUMD maupun lain-lain PAD yang sah.

Simanjuntak dalam Halim mengemukakan bahwa potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk

---

<sup>25</sup>Kaho Josep Riwu, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhinya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 283.

<sup>26</sup> LKPJ AMJ Walikota Bandar Lampung Tahun 2010-2015

mengetahui potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibutuhkan pengetahuan tentang analisis perkembangan beberapa variabel yang dapat dikendalikan dan variabel yang tidak dapat dikendalikan.<sup>27</sup>

Variabel yang dapat dikendalikan yaitu variabel-variabel kebijakan dan kelembagaan yang diatur oleh pemerintah daerah itu sendiri, antara lain kondisi awal suatu daerah, peningkatan cakupan atau ekstesifikasi dan intensifikasi penerimaan PAD, pengadaan bangunan baru, mencari sumber pendapatan baru, perubahan peraturan, dan penyesuaian tarif. Sedangkan variabel yang tidak dapat dikendalikan yaitu perkembangan PDRB perkapita riil, jumlah penduduk, dan tingkat inflasi.<sup>28</sup>

Pembangunan menurut pandangan islam merupakan kegiatan yang sangat penting dikarenakan pembangunan diperlukan setiap wilayah untuk memajukan wilayah tersebut. Pembangunan dalam islam tidak hanya sebatas pembangunan infrastruktur tetapi pembangunan moral dan spiritual setiap masyarakatnya sangat diperlukan.<sup>29</sup>

Pelaksanaan pembangunan dibutuhkannya dana yang bersumber dari penerimaan pemerintah yang direalisasikan melalui keuangan publik. Islam menekankan dalam pencapaian kesejahteraan dan pemerataan pembangunan yang bersumber pada penerimaan negara harus dikelola secara optimal, demi

---

<sup>27</sup> Abdul Halim, *Bunga Rampai Menejemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta : UUP AMP YKPN, 2007), h. 101

<sup>28</sup> Eni Aryanti, Iin Indarti, "Pengaruh Variabel Makro Terhadap Pendapatan Asli DAERAH Periode 2000-2009 Di Kota Semarang" *Jurnal Kaajian Akuntansi dan Bisnis* Vol 1, No. 1 (2012), *Jurnal. Widyamangala.ac.id*, h. 35

<sup>29</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam Cetakan ke-1*, (Jakarta : Kencana, 2015), h. 32

kebutuhan dan kemakmuran generasi yang berkesinambungan, meningkatkan kemaslahatan umat serta tidak boleh berlebihan.<sup>30</sup>

Pembangunan keuangan publik dapat dimulai dari sumber yang bersifat mikro. Konsep *Istihlaf* atau tanggung jawab amanah dalam setiap individu atau perusahaan dapat dijadikan sebagai faktor penting yang dijadikan landasan kebijakan Negara dalam pembangunan sosio-ekonomi.<sup>31</sup> Sumber daya yang berlimpah dalam suatu masyarakat atau Negara akan terbangun secara maksimal berbasis konsep *Istikhlaf*, sebaliknya sumber daya keuangan seperti zakat dan pajak akan menjadi tidak maksimal jika konsep *Istikhlaf* tidak terbangun dalam masyarakat.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan zakat menjadikan tidak optimalnya dalam penggunaan keuangan publik oleh pemerintahan dikarenakan tidak tercapainya target yang dibutuhkan. Apabila tidak optimalnya penggunaan keuangan publik akan berdampak pada pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk pembangunan daerah sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seperti dijelaskan dalam Kitab Suci Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 29 :

---

<sup>30</sup> Fajar Hidayanto, "Format Keuangan Publik Yang Islami" Jurnal Ekonomi Islam, Vol/ IV, No. 1, Juli (2010), h. 133 La\_Riba.ac.id

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 134

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا  
يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ  
صَغُورٌ ﴿١٦﴾

*“Artinya: perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasullNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunjok”.*<sup>32</sup>

Penjelasan ayat diatas bahwa Allah memerintahkan setiap hambanya untuk membayar (pajak) jizyah dengan patuh. Hal ini berkaitan dengan pengoptimalan keuangan publik. Apabila masyarakat bertanggung jawab dan patuh dalam membayar pajak maka penerimaan pemerintah yang didedikasikan guna pembangunan ekonomi dapat terealisasi dengan baik dan berkelanjutan. Pengoptimalan keuangan publik ini pula agar terjadinya distribusi pendapatan yang merata sehingga terciptanya kesejahteraan dalam masyarakat.

Pemerintah harus menciptakan suatu kondisi ekonomi yang dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, kebijakan pembangunan ekonomi seharusnya dititik beratkan pada sektor ekonomi riil yang secara langsung maupun tidak langsung menyentuh kehidupan rakyat miskin, terutama dalam pembangunan infrastruktur yang berbentuk bangunan fisik seperti jalan umum, rumah susun, fasilitas pendidikan, kesehatan sebagai prasarana dasar

<sup>32</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah* (Bandung : Diponegoro, 2014), h. 191

yang diperlukan dalam pembangunan ekonomi. Akan tetapi pada kenyataannya hal yang terjadi sebaliknya pembangunan yang dirancang tidak berfungsi untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dikarenakan tidak terealisasinya dana pendapat asli daerah yang sudah ditargetkan.

Peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat mempengaruhi kondisi keuangan daerah, apabila penerapan tujuan pembangunan tidak sesuai dengan penerapan pembangunan diakibatkan anggaran pendapatan daerah yang didapatkan tidak mencukupi dikhawatirkan terjadinya pendistribusian yang tidak merata jelas dalam islam hal itu dilarang karena munculnya ketidakadilan dalam masyarakat terutama masyarakat miskin dan tidak terealisasinya pembangunan dengan baik.

#### **D. Batasan Masalah**

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas dan untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penelitian ini peneliti membatasi masalahnya sebagai berikut :

1. Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2006-2015.
2. PDRB terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Tahun 2006-2015.
3. Meninjau dari sudut pandang Ekonomi Islam atas Pengeluaran Pemerintah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota bandar lampung tahun 2006-2015.



### E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung tahun 2006-2015?
2. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung tahun 2006-2015?
3. Bagaimana Pengeluaran Pemerintah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung tahun 2006-2015 dalam Perspektif Ekonomi Islam?

### F. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.<sup>33</sup> Oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk pertanyaan.

- a)  $H_0$  : Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung tahun 2006-2015.
- b)  $H_a$  : Pengeluaran Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung tahun 2006-2015.

---

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan Kombinasi* (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 99

- c)  $H_0$  : PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung tahun 2006-2015.
- d)  $H_a$  : PDRB tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung tahun 2006-2015.

## **G. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung tahun 2006-2015.
- b. Untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung tahun 2006-2015.
- c. Untuk mengetahui Pengeluaran Pemerintah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung tahun 2006-2015 dalam Perspektif Ekonomi Islam

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan : *pertama* bagi Akademisi, memberikan sumbangsih hasil pemikiran mengenai permasalahan apakah Pengeluaran Pemerintah dan PDRB berpengaruh baik secara parsial terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung dalam perspektif Ekonomi Islam tahun 2006-2015. Menambah Literatur

mengenai hal tersebut bagi lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, khususnya jurusan Ekonomi Islam. *Kedua* bagi penulis, menambah wawasan mengenai analisis Pengeluaran Pemerintah dan PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung dalam perspektif Ekonomi Islam.

- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan : *pertama* bagi pemerintah agar dapat melakukan peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung sehingga dapat membiayai pembangunan ekonomi daerah secara mandiri dan terus mengoptimalkan potensi yang dapat meningkatkan penerimaan daerah di Kota Bandar Lampung. *Kedua*, bagi masyarakat agar dapat memperoleh pengetahuan tentang pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam.

#### **H. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi perbandingan dan acuan yang memberikan gambaran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini disadari untuk melakukan penelitian perlu ada suatu bentuk hasil penelitian terdahulu yang dijadikan referensi pembandingan dalam penelitian, untuk itu pada bagian ini akan diberikan penjelasan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Triai dan Yeni Kuntari pada tahun 2010 di Kabupaten Karanganyar yang berjudul “ pengaruh variabel makro terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) periode 2003-2007 di kabupaten karanganyar”. Penelitian ini terdiri dari tiga variabel independen yaitu PDRB, jumlah penduduk, dan tingkat inflasi dan satu variabel dependen yaitu penerimaan PAD. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negative karena kontribusi pajak dan retribusi daerah dalam penyusunan PAD mengalami penurunan, namun PDRB selalu mengikat tiap tahunnya. Secara statistik jumlah penduduk berpengaruh positif, dan inflasi berpengaruh negative terhadap penerimaan PAD. Dan secara simultan keseluruhan variabel makro yaitu PDRB, jumlah penduduk dan tingkat inflasi berpengaruh terhadap PAD.

2. Penelitian lain yang dilakukan oleh Eni Aryanti dan Iin Indarti pada tahun 2010 yang berjudul “pengaruh variabel makro terhadap pendapatan asli daerah periode 2000-2009 di kota semarang”. Penelitian ini memiliki tiga variabel independen yaitu PDRB, jumlah penduduk, dan tingkat inflasi, dan memiliki variabel dependen yaitu PAD. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa secara simultan variabel PDRB dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan secara parsial PDRB berpengaruh signifikan terhadap PAD dan inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PAD di kota semarang.

3. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Hidayatullah A. Taufiq pada tahun 2011 yang berjudul “pengaruh PDRB, jumlah penduduk dan inflasi terhadap pendapatan asli daerah provinsi NTB tahun 2005-2008”. Penelitian ini memiliki tiga variabel independen yaitu PDRB, jumlah penduduk dan inflasi, dan memiliki variabel dependen yaitu PAD. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa secara simultan variabel PDRB, jumlah penduduk dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan secara parsial PDRB tidak mempengaruhi PAD, sedangkan jumlah penduduk mempengaruhi PAD secara signifikan positif dan inflasi mempengaruhi PAD secara signifikan negative di NTB.

4. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Nani Sari, Rahmatia dan Muhammad Yunus Amar yang berjudul “faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten Morowali tahun 2003-2012”. Penelitian ini memiliki tiga variabel independen yaitu pengeluaran pembangunan, jumlah penduduk, dan PDRB, sedangkan variabel dependen dari penelitian ini yaitu PAD. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pembangunan, jumlah penduduk produktif, dan PDRB secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Pengeluaran pembangunan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD dikarenakan proposi anggaran belanja pembangunan di kabupaten Morowali meningkat tetapi peningkatan ini tidak sejalan dengan peningkatan PAD, sedangkan PDRB

memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap PAD di kabupaten Morowali.

5. Penelitian yang dilakukan juga oleh Pande Paramitha Wulandari dan Anak Agung Ketut Ayuningsasi pada tahun 2014 yang berjudul “analisis variabel-variabel yang mempengaruhi pendapatan asli daerah provinsi Bali”. Penelitian ini memiliki variabel independen yaitu pendapatan perkapita, tingkat inflasi, investasi dan otonomi daerah, sedangkan variabel dependen yaitu PAD. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pendapatan perkapita, tingkat inflasi, investasi dan otonomi daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD provinsi Bali. Pendapatan perkapita dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sedangkan tingkat inflasi berpengaruh negatif.

#### **I. Kerangka Pemikiran**

Prasetyo dalam Husna berpendapat bahwa Produk Domestik Bruto Per Kapita atau Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita pada skala daerah dapat digunakan sebagai pengukur pertumbuhan ekonomi yang lebih baik karena lebih tepat mencerminkan kesejahteraan penduduk suatu negara atau suatu daerah yang bersangkutan, atau disebut juga sebagai PDB atau PDRB rata-rata.<sup>34</sup> Maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pendapatan perkapita suatu daerah maka semakin meningkatnya kegiatan ekonomi daerah dan semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut.

---

<sup>34</sup> Umdatul Husna, *Op.Cit.*, h. 36



Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan program yang memerlukan keterlibatan segenap unsur satu lapisan masyarakat. Peranan pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator tentu membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung, termasuk anggaran belanja dalam rangka terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan. Pengeluaran tersebut digunakan untuk administrasi pembangunan dan sebagian lain untuk kegiatan pembangunan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi kegiatan ekonomi.<sup>35</sup> Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi, maka aliran penerimaan pemerintah melalui PAD juga meningkat.

Sedangkan dalam pandangan Ekonomi Islam sendiri bahwa anggaran pendapatan negara merupakan sumber dana yang digunakan oleh pemerintah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga pengoptimalan potensi sumber-sumber penerimaan negara haruslah di gali secara optimal agar dapat mencukupi kebutuhan negara dan dapat didistribusikan secara merata di kalangan masyarakat terutama masyarakat miskin.

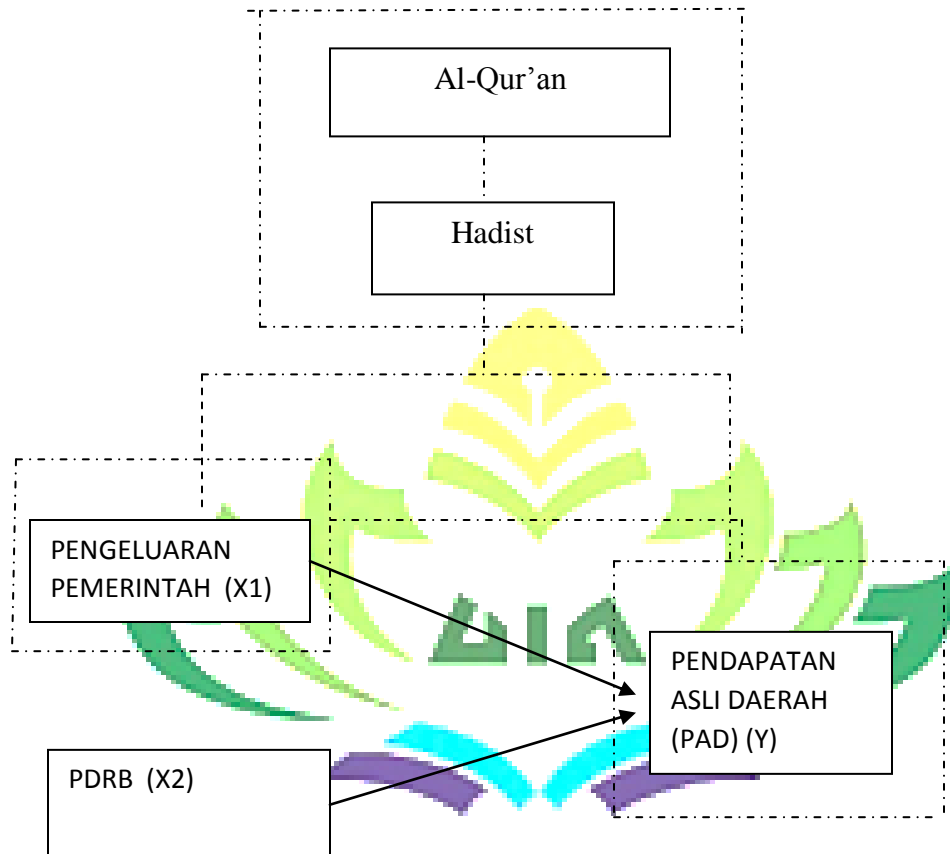
Oleh karena itu, untuk memudahkan peneliti yang dilakukan serta untuk memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini, bahwa penjelasan mengenai hubungan antara variabel diatas, maka ditetapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan variabel Y, dan Pengeluaran Pemerintah sebagai variabel X1, PDRB X2. Dalam hal ini variabel Pengeluaran Pemerintah, PDRB yang

---

<sup>35</sup> Undatul Husna, *Lok.Cit.*, h. 29

akan diuji apakah berpengaruh terhadap variabel PAD menggunakan regresi berganda. Maka disusun suatu kerangka pemikiran teori mengenai penelitian yang akan dilakukan.

Kerangka pemikiran teori dapat dilihat pada Gambar 1.1



Gambar 1.1  
Kerangka Pemikiran  
Uji Parsial

Keterangan : —————> Uji Parsial  
.....> Uji Simultan

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pendapatan Dan Pengeluaran Dalam Ekonomi Islam

##### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Ekonomi Islam

Sebagai sebuah ajaran hidup yang lengkap, islam memberikan petunjuk atas semua aktivitas manusia, termasuk ekonomi. Oleh karenanya tujuan diturunkannya syari'at islam, yaitu untuk mencapai *falah* (kesejahteraan/keselamatan) baik dunia maupun akhirat. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut tugas pemerintah haruslah dapat menjamin kepentingan sosial masyarakatnya dengan cara memenuhi kepentingan publik untuk rakyatnya.

Nurul Huda menjelaskan dalam konsep islam, pemenuhan kepentingan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan, memelihara, dan mengoperasikan *Public utilities* (pelayanan publik) untuk menjamin tepenuhinya kepentingan sosial.<sup>36</sup>

Pemikiran Islam An-Nabahan dalam Adi, pemerintah merupakan lembaga formal yang mewujudkan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua rakyatnya. Pemerintah mempunyai segudang

---

<sup>36</sup> Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islam : Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta : Kencana, 2012), h. 1

kewajiban yang harus dipikul demi mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya, salah satunya bertanggung jawab terhadap perekonomian.<sup>37</sup>

Untuk mewujudkan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sebagai tanggung jawab pemerintah agar menciptakan kesejahteraan, pemerintah memiliki kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengatur pemerintahannya. Tujuan dari kebijakan fiskal dalam islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan islam yaitu islam menetapkan pada tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi, ekonomi islam akan dikelola untuk membantu dan mendukung ekonomi masyarakat yang terbelakang.<sup>38</sup>

Pada masa islam, pemerintah menggunakan biaya-biaya untuk melakukan pembangunan sebagai salah satu tanggung jawab terhadap masyarakat agar dapat terus merasa sejahtera. Terkait pembiayaan sektor publik oleh negara.

---

<sup>37</sup> Nurul Huda, et al, *Op.Cit.*, h. 193

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 191

**a. Sumber-sumber pendapatan negara zaman Rasulullah SAW, sebagai berikut :**

**1) Zakat**

Zakat adalah sebagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan kepada pemerintah/pengurus kaum muslimin, untuk membiayai kebutuhan bersama terutama menyangkut pengembangan SDM. Pada periode Makkah zakat disyariatkan sebagai anjuran yang bersandar pada kesadaran pribadi Muslimin akan perlunya membentuk sebuah masyarakat atau umat yang berkeadilan dengan jalan membebaskan kemiskinan atau umat yang berkeadilan dengan jalan kemiskinan dan kefakiran lainnya. Sedangkan pada periode Madinah, pungutan zakat menjadi wajib dan diambil alih oleh pemerintah dengan menugaskan amil atau pemungut.<sup>39</sup> Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT, dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Artinya : Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Nurul Huda dkk, *Op.Cit.*, h. 25-26

<sup>40</sup> Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, h. 7

## 2). *Kharraj*

Sumber pendapatan yang pertama kali diperkenalkan di zaman Rasulullah SAW, adalah *Kharraj*. *Kharraj* adalah pajak terhadap tanah, atau di Indonesia setara dengan pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perbedaan yang mendasar antara sistem PBB dengan sistem *Kharraj* adalah bahwa *Kharraj* ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas dari tanah (*Land Productivity*) bukan berdasarkan *Zoning*.<sup>41</sup> Hal ini berarti bahwa bisa jadi untuk tanah yang bersebelahan sekalipun misalnya di satu sisi ditanami anggur sedangkan di sisi lain ditanam kurma, maka mereka harus membayar jumlah *Kharraj* yang berbeda.

## 3). *Khums*

Para ulama *Sy'i* mengatakan bahwa sumber pendapatannya apa pun harus dikenakan *Khums* sebesar 20%, sedangkan ulama *Sunni* beranggapan bahwa ayat ini hanya berlaku untuk harta rampasan perang saja. Imam Abu Ubaid dalam *Adi* menyatakan bahwa yang dimaksud *Khums* ini bukan saja hasil perang, tetapi juga barang temuan dan barang tambang.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Adimarwan Karim, *Ekonomi Makro Islam Edisi ke-3*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), h. 264

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 264

#### 4). *Ghonimah dan Fa'i*

Jika tanah dan harta lain diperoleh dari peperangan disebut *Ghonimah*, jika pergantian pemerintahan tidak dengan peperangan tetapi mungkin dengan kudeta atau memenangkan pemilu, penyerahan secara damai negara jajahan dan cara-cara lain maka tanah negara dan harta benda lainnya disebut *Fa'i*.<sup>43</sup>

#### 5). *Jizyah*

*Jizyah* adalah pajak yang dibayar oleh orang-orang non-muslim sebagai pengganti fasilitas sosial-ekonomi dan layanan kesejahteraan lainnya. Serta untuk mendapatkan perlindungan keamanan dari negara islam. *Jizyah* sama dengan Pull Tax, karena orang-orang non-muslim tidak mengenal zakat fitrah. Jumlah yang harus dibayar sama dengan jumlah minimum yang dibayar oleh orang islam. Seperti dijelaskan dalam kitab Suci Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 29 :

فَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ  
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا  
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

“Artinya :Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan adama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan

---

<sup>43</sup> Nurul Huda dkk, *Op.Cit.*, h. 30



*Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.*<sup>44</sup>

#### 6). Pendapatan Lainnya

Pendapat lainnya pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat diantaranya yaitu ada yang disebut *Kaffarah*, yaitu denda misalnya denda yang dikenakan kepada suami istri yang berhubungan di siang hari pada bulan puasa. Mereka harus membayar denda dan denda tersebut masuk dalam pendapatan negara.<sup>45</sup>

Huda berpendapat bahwa disamping penerimaan negara yang pokok, pemerintah negara muslim juga memiliki pendapatan lainnya seperti *Wakaf* (pemberian aset abadi dari rakyat untuk kebutuhan publik yang terbatas maupun tidak terbatas, lalu *Kalalah* (bagian negara dari warisan), dan barang temuan, harta karun, dan lainnya.<sup>46</sup> Jika kebutuhan publik belum terpenuhi, negara dapat memungut pajak tambahan. Negara juga dapat menerbitkan surat utang baik kepada rakyat maupun negara lain yaitu *Sukuk*.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> Kementerian Agama RI, *Log.Cit.*, h. 191

<sup>45</sup> Adimarwan Karim, *Op.Cit.*, h. 266

<sup>46</sup> Nurul Huda dkk, *Op.Cit.*, h. 35

<sup>47</sup> Nurul Huda dkk, *Op.Cit.*, h. 35

## 2. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai perwujudan asa desentralisasi.<sup>48</sup>

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Ahmad Yani adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>49</sup> Sedangkan pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Abdul Halim adalah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan dan lain-lain.<sup>50</sup> Kemudian Aries Djaenuri mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 51-52

<sup>49</sup> *Ibid.*, h. 51

<sup>50</sup> Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi, *Lok. Cit.*, h. 101

<sup>51</sup> Aries Djaenuri, *Lok. Cit.*, h. 88

Hasil dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber ekonomi wilayah dalam wilayah sendiri yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah dan perundang-undangan.

Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor. Yang dimaksud dengan peraturan daerah yang mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh daerah terhadap objek-objek yang telah dikenakan pajak oleh pusat dan provinsi sehingga menyebabkan menurunnya daya saing daerah.

#### **a. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini digali sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah masing-masing.

##### **1). Pajak Daerah**

Perpajakan daerah adalah kewajiban penduduk (masyarakat) menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan

suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukuman.<sup>52</sup>

Pajak daerah, sebagai salah satu pendapatan asli daerah (PAD) diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.<sup>53</sup>

## **2). Jenis dan Objek Pajak Daerah**

Jenis pajak daerah terbagi menjadi dua macam yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Jenis pajak provinsi terdiri dari sebagai berikut<sup>54</sup>:

- a) Pajak kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air. Objek pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

---

<sup>52</sup> Rahardjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h. 77

<sup>53</sup> Ahmad Yani, *Op. Cit.*, h. 53

<sup>54</sup> Ahmad Yani, *Op. Cit.*, h. 54

- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air. Objek pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan diatas Air adalah penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- d) Pajak pengambilan dan pemanfaatam air bawah tanah dan air permukaan. Objek pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan.

Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari sebagai berikut <sup>55</sup> :

- a) Pajak Hotel. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran termasuk fasilitas penginapan, pelayanan pengunjung, dan jasa persewaan gedung untuk kegiatan atau pertemuan di hotel .
- b)Pajak Restoran. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan rstoran dengan pembayaran.
- c)Pajak Hiburan. Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut biaya.
- d)Pajak Reklame. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.

---

<sup>55</sup> Drs. Darwin., MBP, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2010), h. 119-128

e) Pajak Penrangan Jalan. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Objek pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C.

g) Pajak Parkir. Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

### **3) Retribusi Daerah**

Retribusi daerah, sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Retribusi Daerah menurut Mardiasmo adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>56</sup>

Sedangkan Retribusi Daerah menurut Ahmad Yani adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>57</sup>

Retribusi Daerah dari beberapa pengertian dapat diambil kesimpulan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat atau badan. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revis Tahun 2011*, (Yogyakarta : CV ANDI OFFSET, 2011), h. 15

<sup>57</sup> Ahmad Yani, *Op.Cit.*, h. 63

<sup>58</sup> Aries Djaenuri, *Op.Cit.*, h. 95



### a) **Objek Retribusi Daerah**

Objek Retribusi Daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu sebagai berikut<sup>59</sup>:

#### 1) **Retribusi Jasa Umum**

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP Dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Dan Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

---

<sup>59</sup> Ahmad Yani, *Op.Cit.*, h. 64-71

## 2) **Retribusi Jasa Khusus**

Retribusi Jasa Khusus adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta. Jenis-jenis retribusi jasa khusus yaitu, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Villa, Retribusi Penyedotan Kakus, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal, Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga, Retribusi Penyeberangan Di Atas Air, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Produksi Usaha Daerah.

## 3) **Retribusi Perizinan Tertentu**

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu yaitu, Retribusi Izin

Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek.

#### 4) **Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD.<sup>60</sup> Jika pengelolaan tersebut memperoleh laba, maka laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan ini mencakup yaitu, Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta Atau Kelompok Usaha Masyarakat.

#### 5) **Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah**

Lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah ini di beberapa daerah, misalnya didapatkan dari sumber berikut : Hasil penjualan barang milik daerah ; Jasa Giro ; Sumbangan pihak ketiga ; Penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah ; setoran kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga ; denda keterlambatan pelaksanaan

---

<sup>60</sup> *Ibid*, h. 73-74

pekerjaan daerah;<sup>61</sup> pendapatan denda pajak ; pendapatan denda retribusi, fasilitas sosial dan umum ; pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan ; pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.<sup>62</sup>

### **3. Konsep Pengeluaran Pemerintah**

#### **a. Pengeluaran Pemerintah dalam Ekonomi Islam**

Pelaksanaan zakat pada zaman Rasulullah SAW sebagai pembiayaan publik dan yang kemudian diteruskan para sahabatnya, yaitu para petugas mengambil zakat dari para muzaki, atau muzaki sendiri secara langsung menyerahkan zakatnya pada Baitulmal, lalu oleh para petugasnya (amil zakat) didistribusikan kepada para Mustahik. Pada masa Rasulullah SAW, masalah pengelolaan zakat, walaupun dalam bentuk yang sederhana namun pengelolaan zakat pada masa itu dapat dinilai berhasil.

Huda berpendapat bahwa kebijakan pengeluaran adalah unsur kebijakan fiskal di mana pemerintah atau negara membelanjakan pendapatan yang telah dikumpulkan tadi. Dengan kebijakan pengeluaran inilah negara dapat melakukan proses distribusi pendapatan kepada masyarakat dan dengan kebijakan ini pula

---

<sup>61</sup> Aries Djaenuri, *Op.Cit.*, h. 99

<sup>62</sup> Ahmad Yani, *Op.Cit.*, h. 74

maka negara bisa menggerakkan perekonomian yang ada di masyarakat.<sup>63</sup>

Ibnu Taimiyah mengemukakan pendapat bahwa prinsip dasar dari pengelolaan pengeluaran adalah pendapatan yang ada di tangan pemerintah atau negara merupakan milik masyarakat sehingga harus dibelanjakan untuk kebutuhan masyarakat sesuai dengan pedoman Allah SWT.<sup>64</sup>

Pengalokasian sumber penerimaan terhadap pengeluaran tidak serta merta dilakukan untuk pengeluaran tersebut. Ada pengaturan dan sumber pendapatan dan pengeluaran. Setiap pos pemasukan di dalam baitulmal mempunyai mekanisme masing-masing untuk dikeluarkan atau dibelanjakan oleh negara, sehingga akan mempunyai variasi dampak positif terhadap perekonomian negara dan masyarakat.

Adi berpendapat bahwa pengeluaran negara yang lebih banyak untuk kemaslahatan umat pada zaman Rasulullah SAW, dan Khulafa ar-Rasyidin diantaranya sebagai berikut<sup>65</sup>:

#### 1) Pendidikan dan Kebudayaan

Masa pemerintahan Rasulullah SAW, dan Khulafa ar-Rasyidin, pendidikan dan kebudayaan mendapat perhatian yang

---

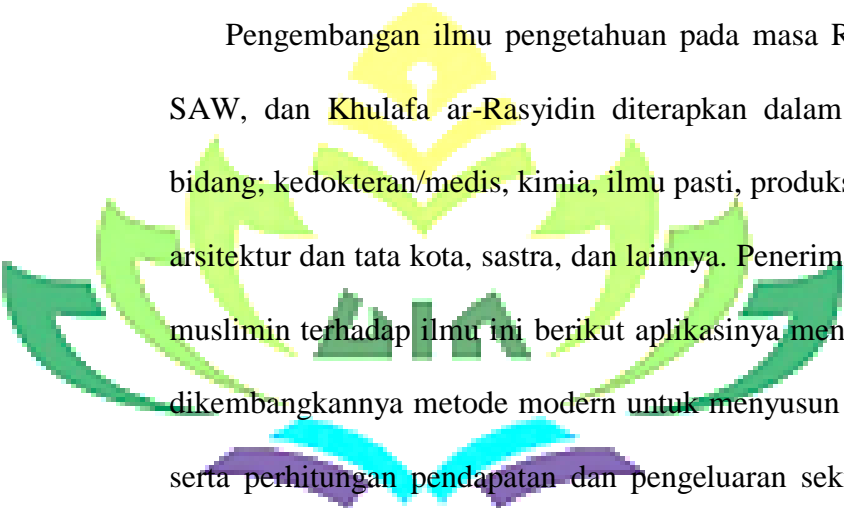
<sup>63</sup> Nurul Huda dkk, *Op.Cit.*, h. 187

<sup>64</sup> *Ibid*, h. 191

<sup>65</sup> Adiwarmar Karim, *Op.Cit.*, h. 275

penting sekali. Hal ini tetap dilakukan selama masa pemerintahan islam selanjutnya untuk meningkatkan kualitas SDM. Pada masa sekarang ini, perolehan pendidikan sangatlah sulit dikarenakan biaya yang tinggi, hal ini menuntut adanya prioritas dalam prorgam pembelanjaan pemerintah pada pembangunan lembaga-lembaga pendidikan dan pelayohan keterampilan kerja di daerah pedesaan dan masyarakat miskin.

## 2) Pengembangan Ilmu Pengetahuan



Pengembangan ilmu pengetahuan pada masa Rasulullah SAW, dan Khulafa ar-Rasyidin diterapkan dalam berbagai bidang; kedokteran/medis, kimia, ilmu pasti, produksi senjata, arsitektur dan tata kota, sastra, dan lainnya. Penerimaan kaum muslimin terhadap ilmu ini berikut aplikasinya menyebabkan dikembangkannya metode modern untuk menyusun anggaran serta perhitungan pendapatan dan pengeluaran sektor-sektor publik.

## 3) Pembangunan Armada Perang dan Keamanan

Untuk membangun armada perang dan keamanan diperlukan dan yang cukup besar. seperlima harta rampasan perang yang diambil dari setiap peperangan merupakan sumber dana Baimatulmal terpenting yang terutama

digunakan untuk memperkuat pengembangan pasukan kaum muslimin.

#### 4) Penyediaan Pelayanan Kesejahteraan

Subsidi negara untuk para *Fuqara* dan *Masakin* (orang-orang yang tidak mampu) bukan sekedar dibagi rata dan diberikan dalam jumlah yang kecil-kecil, tetapi juga mereka dijamin oleh pemerintah selama satu tahun agar tidak sampai kekurangan. Sumber-sumber dana yang ada di baitulmal pada masa islam digunakan untuk tujuan masing-masing yang spesifik, diantaranya : menyantuni fakir miskin, menampung tuna wisma, menggaji para pengumpul akat, menolong orang-orang yang baru masuk islam, melakukan aktivitas pekerjaan umum.

Menurut Manan dalam Huda, negara modern dewasa ini harus mulai dengan pengeluaran yang mutlak diperlukan dan mencari jalan dengan cara-cara untuk mencapainya, baik dengan rasionalisasi struktur pajak atau dengan mengambil kredit dari sistem perbankan atau dari luar negeri. Pada masa islam dini, penerimaan zakat dan sedekah merupakan sumber pokok pendapatan.<sup>66</sup> Jelaslah, dizaman modern, penerimaan ini tidak dapat memenuhi persyaratan anggaran yang berorientasikan pertumbuhan modern dalam suatu negara islam,

---

<sup>66</sup> Nurul Huda dkk, *Op.Cit.*, h. 238



sehingga diperlukan untuk mengenakan pajak baru untuk kepentingan dan kemajuan sosial.

#### **b. Pengertian Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran pemerintah merupakan alokasi anggaran yang disusun dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN) setiap tahunnya ke berbagai sektor atau bidang dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat melalui berbagai macam program.

Pengertian pengeluaran pemerintah menurut Sadono Sukirno adalah pembelanjaan pemerintah ke atas barang-barang modal, barang konsumsi dan ke atas jasa-jasa.<sup>67</sup> Sedangkan menurut Guritno menjelaskan pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.<sup>68</sup>

Beberapa pengertian pengeluaran pemerintah maka dapat di ambil kesimpulan bahwa yang di maksud dengan pengeluaran pemerintah adalah pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap barang dan jasa.

---

<sup>67</sup> Sadono Sukirno dkk, *Lok.Cit.*, h. 192

<sup>68</sup> Guritno Mangkoesoebroto, *Ekonomi Publik*, Edisi Ketiga, (Yogyakarta : BPFE, 2010), h. 169

### c. Teori-Teori Pengeluaran Pemerintah

Adapun teori-teori perkembangan pengeluaran pemerintah yaitu<sup>69</sup>:

#### 1) Teori Rostow dan Musgrave

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, misalnya pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya.

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan swasta yang semakin besar pula banyak menimbulkan kegagalan pasar, dan membuat pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang banyak. Pada tahap lebih lanjut, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial.

---

<sup>69</sup> *Ibid*, h. 170-175

## 2) Teori Wagner

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam presentase terhadap GNP. Menurutny dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Hal ini disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$P_{KPP_1} < P_{KPP_2} < \dots < P_{KPP_n}$$

$$PPK_1$$

$$PPK_2$$

$$PPK_n$$

$P_{KPP}$  : Pengeluaran Pemerintah per kapita

$PPK$  : Pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah penduduk

1,2,...,n : jangka waktu (tahun)

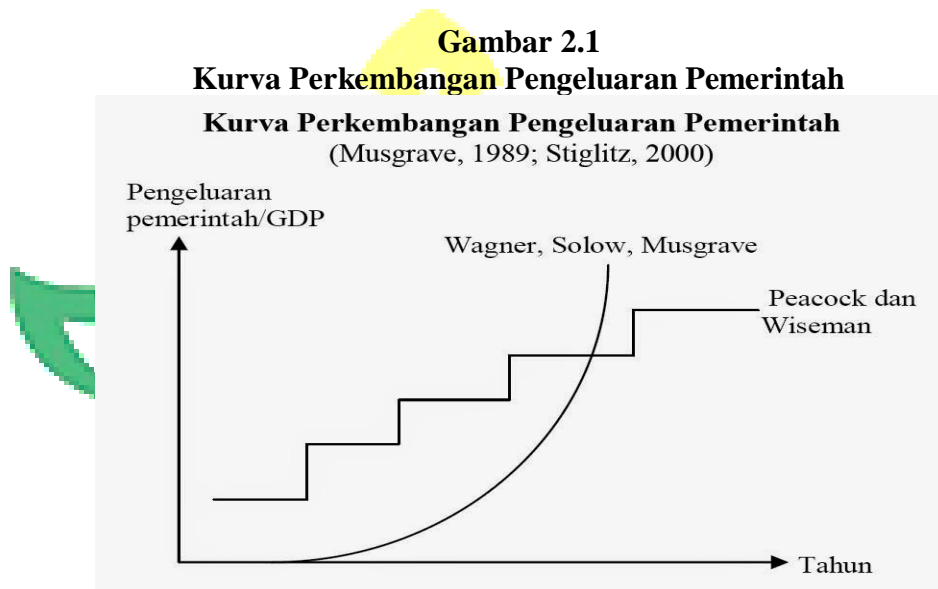
## 3) Teori Peacock dan Wiseman

Teori ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiaya pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut.

Teori Peacock dan Wiseman menyatakan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah ; dan meningkatnya penerimaan

pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah semakin besar.

Berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman tidaklah berbentuk suatu garis, tetapi berbentuk seperti tangga sebagaimana terlihat pada diagram.



*Sumber : Guritno Mangkoesobroto, Ekonomi Publik, 2018*

#### **d. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli**

##### **Daerah**

Mardiasmo dalam Indra menyatakan bahwa optimalisasi penerimaan PAD harus didukung dengan upaya peningkatan kualitas layanan publik. Berbagai belanja yang dilaokasikan pemerintah hendaknya yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakatnya.<sup>70</sup> Hal ini berkaitan dengan retribusi daerah. Masyarakat lebih mudah untuk membayar retribusi dari pada pajak.

Pemerintah daerah harus mampu menjalankan rumah tangganya sendiri secara mandiri dengan memberikan layanan publik yang baik. Dalam rangka meningkatkan kemandiriannya, pemerintah dituntut untuk meningkatkan pelayanan publik. Anggaran belanja modal yang dikeluarkan pemerintah diantaranya untuk biaya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat dapat menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Dengan tersedianya fasilitas pelayanan publik membuat masyarakat akan lebih aktif dan bergairah dalam bekerja dan bertambah produktivitas masyarakat dan investor di daerah, akan berdampak pada peningkatan PAD.

---

<sup>70</sup> Indra Rindu Datu K, *Op.Cit.*, h. 29

Teori barang publik yang dijelaskan Pirou, ia berpendapat bahwa barang publik harus disediakan sampai suatu tingkat di mana kepuasan marginal akan barang publik sama dengan ketidakpuasan marginal (*marginal disutility*) akan pajak yang dipungut untuk membiayai program-program pemerintah atau untuk menyediakan barang publik.<sup>71</sup> Teori anggaran juga menjelaskan bahwa dimana setiap orang membayar atas penggunaan barang-barang publik dengan jumlah yang sama, yaitu sesuai dengan sistem harga untuk barang-barang swasta (*private good*).<sup>72</sup>

Sadono Sukirno dalam Husna, menjelaskan pelaksanaan pembangunan daerah merupakan program yang memerlukan keterlibatan segenap unsur satu lapisan masyarakat. Peranan pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator tentu membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung, termasuk anggaran belanja dalam rangka terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan.<sup>73</sup> Pengeluaran tersebut digunakan untuk administrasi pembangunan dan sebagian lain untuk kegiatan pembangunan di berbagai jenis infrastruktur yang penting. Pembelanjaan-pembelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi kegiatan ekonomi. Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi, maka aliran penerimaan pemerintah melalui PAD juga meningkat.

---

<sup>71</sup> Guritno Mangkoesobroto, *Op.Cit.*, h. 64

<sup>72</sup> *Ibid*, h. 82

<sup>73</sup> Umdatul Husna, *Op.Cit.*, h. 29

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik. Hubungan pengeluaran pemerintah dengan PAD sangat jelas, apabila pengeluaran pemerintah digunakan untuk penyediaan barang publik dan pelayanan publik hal ini dapat meningkatkan kegiatan ekonomi daerah tersebut. Meningkatnya kegiatan ekonomi membuat pemerintah akan mengenakan pajak dan retribusi sehingga memberikan sumbangan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).

#### **4. Konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

##### **a. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Salah satu cara untuk melihat kemajuan ekonomi adalah dengan mencermati nilai pertumbuhan PDRB. Pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan, karena nilai PDRB ini tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, sehingga perubahan yang diperoleh merupakan perubahan riil yang tidak dipengaruhi oleh fluktuasi harga.

Pengertian PDRB menurut Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung yaitu hasil penjumlahan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu wilayah pada suatu periode waktu tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki

oleh penduduk daerah tersebut.<sup>74</sup> <sup>75</sup>Selanjutnya menurut Tarigan pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di wilayah itu.

Beberapa pengertian PDRB diatas maka dapat disimpulkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah seluruh nilai tambah bruto dari segala kegiatan perekonomian suatu wilayah tertentu.

#### **b. Metode Perhitungan PDRB**

Perhitungan PDRB dapat menggunakan dua harga yaitu PDRB atau harga berlaku dan PDRB atas harga konstan, yang dimana PDRB atas harga berlaku merupakan nilai suatu barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut. Sedangkan PDRB atas harga konstan merupakan nilai suatu barang atau jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu.<sup>76</sup>

Metode perhitungan PDRB dibagi menjadi dua metode yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Penjelasannya sebagai berikut :

##### **1). Metode Langsung**

Metode langsung adalah perhitungan dengan menggunakan data daerah atau data asli yang menggambarkan kondisi daerah dan digali

---

<sup>74</sup> Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, Tahun 2015, [www.bandarlampungkota.bps.go.id](http://www.bandarlampungkota.bps.go.id)

<sup>75</sup> Robinson Tarigan, *Lok.Cti.*, h. 18

<sup>76</sup> *Ibid*, h. 21



dari sumber data yang ada di daerah itu sendiri. Metode langsung dapat dilakukan dengan menggunakan tiga macam cara, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran.<sup>77</sup>

- a) Pendekatan produksi adalah perhitungan nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan/sector ekonomi dengan cara mengurangi biaya antara dari total nilai produksi bruto sector atau subsector tersebut. Pendekatan ini sering digunakan untuk memperkirakan nilai tambah dari sector/kegiatan yang produksinya berbentuk fisik/barang, seperti pertanian, pertambangan, dan industri sebagainya. Nilai tambah ini merupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang diperoleh oleh unit produksi sebagai input antara, nilai yang ditambahkan sama dengan balas jasa faktor produksi atas keikutsertaannya dalam proses produksi.

- b) Pendekatan pendapatan

Pendekatan ini merupakan nilai tambah dari kegiatan-kegiatan ekonomi dihitung dengan cara menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji surplus usaha, penyusutan, dan pajak tidak langsung neto. Pada sector pemerintahan dan usaha yang sifatnya tidak mencari keuntungan, surplus usaha seperti bunga neto, sewa tanah dan keuntungan tidak diperhitungkan.

---

<sup>77</sup> Lincoln Arsyad, *Op.Cit.*, h. 21

c) Pendekatan pengeluaran

Pendekatan dari segi pengeluaran adalah menjumlahkan nilai penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri.<sup>78</sup> Pendekatan pengeluaran digunakan untuk menghitung nilai barang dan jasa yang digunakan oleh berbagai kelompok dalam masyarakat untuk kepentingan konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (investasi), perubahan stok, dan ekspor netto dimana nilai barang dan jasa hanya berasal dari produksi domestik, total pengeluaran dari komponen-komponen tersebut harus dikurangi nilai impor sehingga nilai ekspor menjadi nilai ekspor netto. Penjumlahan seluruh komponen pengeluaran akhir ini disebut PDRB atas dasar harga pasar.

**2). Metode Tidak Langsung**

Metode tidak langsung adalah suatu cara mengalokasikan produk domestik bruto dari wilayah yang lebih luas ke masing-masing bagian wilayah, misalnya mengalokasikan PDB indonesia ke seluruh wilayah bagian indonesia menggunakan alokator tertentu. Alokator-alokator tersebut yang dapat digunakan diantaranya, yaitu:<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Robinson Tarigan, *Op.Cit.*, h. 24

<sup>79</sup> *Ibid*, h. 25

- a) Nilai produksi bruto atau neto setiap sektor/subsektor, pada wilayah yang dialokasikan,
- b) Jumlah produksi fisik,
- c) Tenaga kerja,
- d) Penduduk

Dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari beberapa alokator dapat diperhitungkan persentase bagian masing-masing provinsi terhadap nilai tambah setiap sektor dan subsektor.

### c. Sumber-Sumber PDRB

PDRB diperlukan suatu indikator untuk mengukur tingkat kemajuan pertumbuhan ekonomi suatu negara, dimana dari indikator tersebut dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kemajuan pertumbuhan atau tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah atau negara dan mengetahui corak PDRB. Ada beberapa indikator untuk mengetahui tingkat PDRB yaitu sebagai berikut :

#### 1). Pendapatan perkapita

Pendapatan perkapita adalah rata-rata penduduk suatu negara pada periode tertentu pendapatan perkapita dapat diperoleh dari pendapatan nasional dengan jumlah penduduk suatu negara yang memiliki pendapatan perkapita meningkat dari pada periode sebelumnya.

#### 2). Tenaga kerja dan pengangguran

Tenaga kerja dan pengangguran adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan pengangguran merupakan kebalikan dari tenaga kerja, suatu negara dikatakan memiliki PDRB jika jumlah tenaga kerjanya lebih tinggi dari jumlah penganggurannya.

### 3). Kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat PDRB. Kesejahteraan masyarakat bisa dilihat dari tingkat kemiskinan yang semakin berkurang dan daya beli masyarakat yang semakin meningkat. Kesejahteraan masyarakat juga ditandai dengan pendapatan perkapita yang tinggi dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>80</sup>

### d. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Produk Domestik Regional Bruto merupakan data statistik yang merangkum perolehan nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah pada satu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu untuk mengetahui perkembangan dan struktur ekonomi suatu wilayah diyakini masih merupakan indikator dalam menentukan arah

---

<sup>80</sup> Lincolyn Arsyad, *Op.Cit.*, h. 31

pembangunan yang digambarkan oleh perkembangan produk domestik regional bruto (PDRB).

Perkembangan ekonomi suatu negara dapat terlihat dari perkembangan pendapatan per kapita masyarakatnya. Untuk melihat pendapatan nasional kita dapat melihat dari PDB dan jumlah penduduk suatu negara tersebut. Apabila Produk Domestik Bruto (PDB) terus berkembang maka akan sejalan dengan perkembangan penerimaan pendapatan negara.

Pendapatan perkapita menunjukkan kemampuan masyarakat membayar pengeluarannya termasuk mengkonsumsi barang dan jasa. Menurut Todaro pendapatan perkapita merupakan salah satu ukuran bagi kemakmuran suatu daerah, pendapatan yang tinggi cenderung mendorong naiknya tingkat konsumsi perkapita yang selanjutnya menimbulkan intensif bagi diubahnya struktur produksi pada saat pendapatan meningkat, permintaan akan barang-barang manufaktur dan jasa pasti akan meningkat lebih cepat dari pada permintaan akan produk-produk pertanian.<sup>81</sup>

Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula permintaan barang dan jasa. Hal ini mengakibatkan semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pajak dan

---

<sup>81</sup> Michel P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, (Jakarta : Erlangga, 2006), h. 47

retribusi yang ditarik pemerintah daerah.<sup>82</sup> Maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pendapatan perkapita suatu daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut.

Gillani dalam Siregar menyatakan, peningkatan perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara dapat meningkatkan kapasitas potensi penerimaan pajak, dan juga memungkinkan hal tersebut dapat dipergunakan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dalam sistem perpajakannya, guna mendapatkan penerimaan keuangan yang cukup memadai yang akan dapat dipergunakan untuk mengimbangi pengeluaran negara yang ada.<sup>83</sup> Akan tetapi juga sering dijumpai kasus di beberapa negara, di mana kondisi fiskalnya tiak seimbang (inbalar karena penerimaan pajaknya lebih rendah dari pengeluaran.

Chakim berpendapat bahwa hubungan antara PAD dengan PDRB merupakan hubungan secara fungsional, karena PAD merupakan fungsi dari PDRB. Dengan meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan daerah untuk membiayai program-program pembangunan.<sup>84</sup> Sehingga akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitasnya.

---

<sup>82</sup> Umdatul Husna, "Pengaruh PDRB, Inflasi, Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Se Jawa Tengah" (Skripsi Program studi ekonomi pembangunan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2015), h. 24, *eprints.undip.ac.id*

<sup>83</sup> Ali Chakim, *Op.Cit.*, h. 44

<sup>84</sup> *Ibid*, h. 45

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara kuantitatif. Metode pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada *filsafat positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, yang bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.<sup>85</sup> Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang diukur dalam skala numerik (angka).<sup>86</sup>

Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara melakukan penelaahan terhadap beberapa buku yang berkaitan dengan indikator variabel penelitian.<sup>87</sup> Indikator makro ekonomi yaitu PDRB, Pengeluaran Pemerintah dan juga tentang Pendapatan Asli Daerah yang terkait seperti data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung serta dari

---

<sup>85</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif Dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2015), h. 4

<sup>86</sup> Mudrajat Kuncoro, Ph.D, *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*, (Jakarta : Erlangga, 2009), h.

<sup>87</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta : Bumi Aksara.2008), h. 5

jurnal dan artikel.yang berkaitan dengan data Pengeluaran Pemerintah, PDRB, dan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.<sup>88</sup> Dalam penelitian deskriptif ini dapat digunakan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih sifatnya independen tanpa membuat hubungan ataupun perbandingan dengan variabel lain.<sup>89</sup> Dalam penelitian ini pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi merupakan variabel bebas yang mempunyai pengaruh terhadap variabel terkait yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### B. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan lembaga lainnya yang bukan merupakan pengelolanya tetapi dapat dimanfaatkan oleh penelitian tertentu.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R % D*, (Bandung : Alfabeta, 2016), h. 8

<sup>89</sup> V. Wiratna Sujarweni. *Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi. Cetakan Pertama* (Yogyakarta : Pustaka Baru Pers,2015), h. 16

<sup>90</sup> Sugiyono, *Op.Cit.*,



Data sekunder berasal dari sumber internal maupun eksternal. Dalam hal ini, data sekunder bersifat internal didapat melalui data-data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung yaitu dari total nilai PDRB atas harga konstan, Total Pengeluaran Pemerintah dan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang tersusun dari tahun 2006-2015 berupa data runtut waktu (*time series*) dan yang bersifat eksternal didapat melalui sumber-sumber diluar instansi yang dipublikasikan dan juga jurnal, artikel, Al-Qur'an, Al-Hadist dan Internet. Dalam hal ini yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, untuk mengumpulkan data dan informasi penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan jalan melihat, membaca, mempelajari, kemudian mencatat data yang sudah ada hubungannya dengan objek penelitian.<sup>91</sup> Metode ini dengan mengambil dokumentasi atau data yang mendukung penelitian, seperti total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung tahun 2006-2015, Pengeluaran Pemerintah dan PDRB, dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung.

---

<sup>91</sup> Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta : Gramedia,2010), h. 52

#### D. Definisi Operasional

Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang diungkap dalam definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam lingkup obyek/penelitian yang diteliti. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat.

##### 1. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, yang menyebabkan timbulnya atau berubahnya variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengeluaran Pemerintah dan PDRB.

##### 2. Variabel terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah. Definisi Operasional Variabel dalam penelitian merupakan penjelasan masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung, 2007), h. 40

## E. Metode Analisis Data

Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda. Analisis regresi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen baik secara parsial maupun secara simultan. Sebelum melakukan uji regresi linear berganda, metode mensyaratkan untuk melakukan uji asumsi klasik guna mendapatkan hasil yang terbaik.<sup>93</sup> Tujuan dari asumsi klasik ini agar variabel bebas tidak sebagai estimator atas variabel terikat tidak bias.

### 1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah terdapat masalah di dalam data regresi, maka suatu data perlu dilakukan pengujian yaitu sebagai berikut :

#### a) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak.<sup>94</sup> Metode uji normalitas yang digunakan adalah *Jarque-Bera*. Uji *Jarque-Bera* mengukur perbedaan *Skewness* dan kurtosis data dibandingkan apabila datanya bersifat normal.

---

<sup>93</sup> Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Prpgram IBM SPSS* (Semarang : Universitas Diponegoro, 2009), h. 95

<sup>94</sup> *Ibid*, h. 147

b) Multikolinearitas

Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya antar variabel independen.<sup>95</sup> Pendeteksian dalam multikolinearitas dalam model regresi, dapat dilakukan dengan melihat VIF (*variance inflation factor*) dari hasil regresi.

Ukuran ini menunjukkan setiap independen manakah yang dapat dijelaskan oleh variabel lainnya. Apabila  $VIF > 10$  maka dapat dikatakan terjadi multikolinearitas yang serius.

c) Autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi (hubungan) antara anggota serangkaian observasi yang digunakan menurut waktu dan ruang. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya  $(t-1)$ .<sup>96</sup> Untuk mengetahui adanya autokorelasi dapat digunakan *correlation LM test* dengan melihat nilai prob. Dari  $F$  hitung dan *Chi-Square* hitung lebih besar dari tingkat  $\alpha$  0,05. Apabila nilai signifikansi  $> 0,05$  maka dapat dikatakan model regresi tidak mengandung masalah autokorelasi.

---

<sup>95</sup> Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS* ( (Edisi Kelima) (Semarang : Universitas Diponegoro, 2011), h. 95

<sup>96</sup> *Ibid*, h. 99

#### d) Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain.<sup>97</sup> Jika *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.<sup>98</sup> Untuk mengetahui adanya gejala heteroskedastisitas dapat menggunakan uji *white*. Uji *white* dilakukan dengan ketentuan nilai prob. Dari F hitung dan *Chi-Square* hitung lebih esar dari tingkat alpha 0,05. Apabila nilai signifikansi  $> 0,05$  maka dapat dikatakan model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.

## 2. Teknik Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi merupakan teknik analisis untuk jenis penelitian yang bersifat asosiatif. Analisis regresi bertujuan yang mempelajari “pengaruh” variabel bebas (*predictor*) terhadap variabel terikat (*criterion*).<sup>99</sup> Adapun persamaannya adalah :

---

<sup>97</sup> *Ibid*, h. 125

<sup>98</sup> *Ibid*, h. 125

<sup>99</sup> Kadir, *Statistik Terapan (Konsep, Contoh dan Analisis Data Dengan Program SPSS/Lisrel Dalam Penelitian)*, (Depok : Raja Grafindo Persada. 2015), h. 175

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e^{100}$$

Keterangan :

Y = Variabel Dependen yaitu (Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung).

a = Konstanta.

b = Koefisien Regresi.

X1 = Variabel Independen (Variabel Pengeluaran Pemerintah).

X2 = Variabel Independen (Variabel PDRB).

### 3. Uji Signifkansi Parsial

Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dengan derajat keabsahan 5%.

Pengambilan kesimpulannya dengan ketentuan :

- a) Jika nilai sig <  $\alpha$  maka  $H_0$  ditolak.
- b) Jika nilai sig >  $\alpha$  maka  $H_0$  diterima.<sup>101</sup>

<sup>100</sup> Usman, Husnaini dan Setiadi, *Pengantar Statistika*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2003), h. 247

<sup>101</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Edisi revisi ke 2, (Bandung : Raja Grafindo Persada, 2010), h. 27

#### 4. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara serentak. Uji ini dilakukan untuk membandingkan pada tingkat nilai signifikansi dengan nilai  $\alpha$  (5%) pada tingkat derajat 5%. Pengambilan keputusanya dengan ketentuan :<sup>102</sup>

- a) Jika nilai  $\text{sig} < \alpha$  maka  $H_0$  ditolak
- b) Jika nilai  $\text{sig} > \alpha$  maka  $H_0$  diterima.

#### 5. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.<sup>103</sup> Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.<sup>104</sup>

---

<sup>102</sup> *Ibid*, h. 27

<sup>103</sup> Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Progra IBM SPSS* ( (Edisi kelima)) (Semarang : Universitas Diponegoro, 2011), h. 87

<sup>104</sup> *Ibid*, h. 87

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian**

###### **a. Sejarah singkat Kota Bandar Lampung**

Sebelum tanggal 18 maret 1964 provinsi lampung merupakan keresidenan. Berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no 3 tahun 1964, yang kemudian menjadi undang-undang no 14 tahun 1964, keresidenan lampung ditingkatkan menjadi provinsi lampung dengan ibu kota tanjung karang-teluk betung. Selanjutnya berdasarkan peraturan pemerintah no 24 tahun 1983. Kotamadya daerah tingkat II tanjung karang-teluk betung diganti namanya menjadi kotamadya daerah tingkat II bandar lampung terhitung sejak tanggal 17 juni 1983 dan sejak 1999 berubah nama menjadi kota bandar lampung.

Berdasarkan undang-undang no 5 tahun 1975 dan peraturan pemerintah no 3 tahun 1982 tentang perubahan wilayah maka kota bandar lampung dimekarkan dari 4 kecamatan 30 kelurahan menjadi 9 kecamatan dengan 58 kelurahan. Kemudian berdasarkan surat keputusan gubernur/KDH tingkat I lampung nomor G/185.B.111/Hk/1988 tanggal 6 juli 1988 serta surat persetujuan



MENDAGRI nomor 140/1799/PUOD tanggal 19 mei 1987 tentang pemekaran kelurahan di wilayah kota bandar lampung, maka kota bandar lampung dimekarkan menjadi 9 kecamatan dan 84 kelurahan. Kemudian berdasarkan peraturan daerah kota bandar lampung nomor 04 tahun 2001 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan kecamatan dan kelurahan, maka kota bandar lampung menjadi 13 kecamatan dengan 98 kelurahan.

Pada tahun 2012, melalui peraturan daerah kota bandar lampung nomor 04 tahun 2012 tentang penataan dan pembentukan kelurahan menjadi kecamatan, yang kemudian diubah dengan peraturan daerah kota bandar lampung nomor 12 tahun 2012 tentang perubahan daerah kota bandar lampung nomor 04 tahun 2012, kembali dilakukan pemekaran kecamatan yang semula berjumlah 13 kecamatan menjadi 20 kecamatan dan pemekaran kelurahan yang semula berjumlah 98 kelurahan menjadi 126 kelurahan.

Sejak tahun 1965 sampai saat ini kota bandar lampung telah dijabat oleh beberapa walikota/KDH tingkat II berturut-turut sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Daftar Walikota Bandar Lampung Beserta Periode Jabatan**

No	Nama walikota/KDH tingkat II	Periode jabatan
1.	Sumarsono	Periode 1956 – 1957
2.	H. Zainal Abiding P.A	Periode 1957 – 1963
3.	Alimunir Umar, SH	Periode 1963 – 1969
4.	Drs. H.M. Thabrani Daud	Periode 1969 – 1976
5.	Drs. H. Fauzi Saleh	Periode 1976 – 1981
6.	Drs. H. Zulkarnain Subbing	Periode 1981 – 1986
7.	Drs. H.A Nurdin Muhayat	Periode 1986 – 1995
8.	Drs. H. Suharto	Periode 1996 – 2006
9.	Edy Sutrisno, S.Pd, M.Pd	Periode 2006 – 2010
10.	Drs. H. Herman HN, MM	Periode 2010 – 2014
11.	Drs. H. Herman HN, MM	Periode 2014 – 2018

*Sumber : Bandar Lampung Dalam Angka 2018*

#### **b. Topografi**

Topografi kota bandar lampung sangat beragam, mulai dari dataran rendah sampai kawasan perbukitan hingga pegunungan, kota bandar lampung terletak pada ketinggian 0 sampai 700 meter daerah dengan topografi perbukitan hingga pegunungan yang membentang dari arah barat ke timur dengan puncak tertinggi pada gunung betung sebelah barat dan gunung di balau serta perbukitan batu serampok disebelah timur. Topografi tiap-tiap daerah di kota bandar lampung adalah sebagai berikut :

- a. Daerah pantai yaitu sekitar teluk betung bagian selatan dan panjang.
- b. Daerah perbukitan yaitu sekitar teluk betung bagian utara.
- c. Daerah dataran tinggi serta sedikit bergelombang terdapat di sekitar tanjung karang bagian barat yang dipengaruhi oleh gunung balau serta perbukitan batu serampok dibagian timur selatan.
- d. Teluk lampung dan pulau-pulau kecil bagian selatan.

Dilihat dari ketinggian yang dimiliki, kecamatan kedaton dan raja basa merupakan wilayah dengan ketinggian paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya yaitu berada pada ketinggian maksimum 700 mdpl. Sedangkan kecamatan teluk betung selatan dan kecamatan panjang memiliki ketinggian masing-masing hanya sekita 2-5 mdpl atau kecamatan dengan ketinggian paling rendah/minimum dari seluruh wilayah kota bandar lampung.

Ditengah-tengah kota mengalir beberapa sungai seperti sungai way halim, way awi, way simpur di wilayah tanjung karang, dan way kuripan, way balau, way kupang, way garuntang, way kuwala mengalir di wilayah teluk betung. Daerah bulu sungai berada dibagian barat, daerah hilir sungai berada di sebelah selatan yaitu di wilayah pantai. Luas wilayah yang datar hingga landai meliputi 60 persen total wilayah, landai hingga miring 35 persen total wilayah, dan sangat miring hingga curam meliputi 4 persen total wilayah.

Sebagian wilayah kota bandar lampung merupakan perbukitan, yang di antaranya yaitu : gunung kunyit, gunung mastur, gunung bakung, gunung sulah, gunung celigi, gunung perahu, gunung cerepung, gunung sari, gunung palu, gunung depok, gunung kucing, gunung banten, gunung sukajawa, bukit serampok, jaha dan lereng, bukit asam, bukit pidada, bukit balau, gugusan bukit hatta, bukit cepagoh, bukit kaliawi, bukit palapa I bukit palapa II, bukit pasir gantung, bukit kaki gunung betung, bukit sukadana ham, bukit susunan baru, bukit sukamenanti, nukit kelumtum, bukit randu, bukit langgar, bukit camang timur dan bukit camang barat.

### **c. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung**

Kota bandar lampung merupakan ibu kota provinsi lampung. Oleh karena itu, selain merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan, kota ini juga merupakan pusat kegiatan perekonomian daerah lampung. Kota bandar lampung terletak di wilayah yang strategis karena merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antar pulau sumatera dan pulau jawa, sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan kota bandar lampung sebagai pusat perdagangan, industri, dan pariwisata.

Ibu kota bandar lampung terletak di teluk betung yang terletak di ujung selatan pulau sumatera. Secara geografis kota bandar lampung terletak pada 5°20' sampai dengan 5°30' lintang selatan dan 105°28'

sampai dengan 105°37' bujur timur. Secara administratif kota bandar lampung dibatasi oleh :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan natar kabupaten lampung selatan.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan teluk lampung.
- c. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan gedung tataan da padang cermin kabupaten pasawaran.
- d. Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan tanjung bintang kabupaten lampung selatan.

## 2. Sarana prasarana Kota Bandar Lampung

### a. Fasilitas pendidikan

Tingkat produktivitas atau ompetisi seseorang sangat ditentukan oleh kualitas manusia yang cerdas dan terampil yang diikuti rasa percaya diri serta sikap dan perilaku yang inovatif. Berdasarkan data pemerintah kota bandar lampung badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) Review RPJM kotab bandar lampung.

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Fasilitas Pendidikan**

Kecamatan	TK	SD	SMP	SMA	SMK	PT	TOTAL
Kedaton	10	11	2	3	1	1	28
Sukarame	18	7	9	5	4	1	44
Tanjung karang barat	8	21	2	4	2	1	38
Panjang	11	19	12	4	2	0	48
Tanjung karang timur	8	16	4	2	3	2	35
Tanjung karang pusat	15	18	14	10	3	6	66
Teluk betung selatan	6	18	8	3	1	0	36
Teluk betung barat	4	11	8	2	0	0	25
Teluk betung utara	11	17	11	7	6	1	53
Rajabasa	14	16	7	4	3	9	53
Tanjung senang	14	11	9	2	3	1	40
Sukabumi	16	17	7	0	2	0	42
Kemiling	12	19	9	5	2	2	49
Labuhan ratu	8	11	3	2	1	5	30
Way halim	14	14	5	2	1	0	36
Langkapura	8	7	2	0	0	1	18
Enggal	9	11	12	9	6	0	47
Kedamaian	11	10	7	4	3	2	37
Teluk betung timur	3	11	2	2	1	0	28
Bumi waras	5	17	4	2	0	0	28
<b>Jumlah</b>	205	282	137	72	44	32	772

*Sumber : RPJMD Kota Bandar Lampung tahun 2016 – 2021*

#### **b. Fasilitas pendidikan**

Dalam upaya meningkatkan fasilitas kesehatan didalam mengatasi masalah kesehatan maka kota bandar lampung terus meningkatkan pelayanan dengan upaya pengadaan berbagai sarana dan prasarana kesehatan diantaranya adalah rumah sakit, puskesmas pembantu, klinik bersalin, klinik dan posyandu.



**Tabel 4.3**  
**Jumlah Fasilitas Kesehatan**

Kecamatan	Rumah sakit	Puskesmas	Puskesmas pembantu	Klinik bersalin	Klinik	Posyandu
Kedaton	3	1	1	0	7	31
Sukarame	1	3	2	0	0	35
Tanjung karang barat	0	2	3	0	1	34
Panjang	0	1	2	0	6	50
Tanjung karang timur	0	2	2	0	0	29
Tanjung karang pusat	0	2	1	0	9	34
Teluk betung selatan	3	1	1	0	4	40
Teluk betung barat	0	1	4	1	1	26
Teluk betung utara	0	2	1	0	4	42
Rajabasa	1	1	5	0	2	33
Tanjung senang	0	1	5	0	0	25
Sukabumi	0	3	2	0	3	44
Kemiling	1	3	8	0	1	41
Labuhan ratu	0	1	1	0	1	27
Way halim	2	1	3	2	1	36
Langkapura	0	1	2	0	1	25
Enggal	4	1	1	0	3	23
Kedamaian	0	1	3	0	3	29
Teluk betung timur	0	2	2	0	0	429
Bumi waras	0	1	3	0	0	40
<b>Jumlah</b>	17	30	50	3	49	675

*Sumber : Bandar Lampung dalam angka 2018*



### 3. Gambaran hasil penelitian

Penelitian ini menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, PDRB terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kota bandar lampung. Data yang digunakan menggunakan data *time series* atau rentang waktu mulai dari tahun 2006-2015. Alat yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan perangkat lunak *views (software)* dengan metode analisis regresi linear berganda. Oleh karena itu, perlu dilihat bagaimana gambaran perkembangan secara umum dari pendapatan asli daerah (PAD), PDRB dan Pengeluaran Pemerintah yang terjadi di Kota Bandar Lampung dari tahun ke tahun.

#### a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung tahun 2006-2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.4**  
**Total Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar**  
**Lampung**  
**Tahun 2006-2015 (dalam rupiah)**

Tahun	Pajak daerah	Retribusi daerah	Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan	Pendapatan lain-lain yang sah	Total pendapatan asli daerah
2006	25.068.634.510	10.526.791.488	2.037.925.672	8.503.807.500	46.137.259.170
2007	30.411.161.966	12.533.404.985	2.149.979.288	8.620.368.522	53.714.914.762
2008	42.841.374.876	14.414.767.716	2.509.144.000	7.896.232.429	67.661.519.022
2009	47.035.295.283	15.849.094.531	3.087.055.409	4.460.818.945	70.432.264.168
2010	56.627.114.786	21.991.781.739	3.449.399.341	4.704.103.833	86.692.399.700
2011	112.602.140.715	68.252.030.150	5.631.089.632	6.198.579.220	162.772.590.332
2012	183.436.575.291	38.431.095.234	6.862.738.923	40.144.717.721	298.696.062.085
2013	242.655.037.332	50.711.105.897	8.237.246.269	59.158.057.632	360.698.350.131
2014	246.655.037.332	42.924.715.312	13.206.503.301	89.351.963.991	394.646.889.446
2015	258.451.264.949	46.235.943.510	11.249.697.683	81.159.929.433	397.547.326.856

*Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2018*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan total dari realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung selama 10 tahun terakhir terus meningkat. Dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2015 Pendapatan Asli Daerah terus meningkat. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2011-2015 mengalami peningkatan yang cukup besar dari tahun sebelumnya. Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung pada sepuluh tahun terakhir yaitu 2006-2015 disebabkan karena terus berkembangnya pembangunan dan PDRB di Kota Bandar Lampung sehingga membuat penerimaan asli daerah (PAD) kota Bandar Lampung terus meningkat.

**b. Total PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)**

Total PDRB adalah seluruh hasil penjumlahan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu wilayah pada suatu periode waktu tertentu yang dihitung dengan atas harga berlaku dan atas harga konstan. Untuk melihat PDRB suatu daerah diukur berdasarkan nilai PDRB atas harga konstan, karena nilai PDRB ini tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, sehingga perubahan yang diperoleh merupakan perubahan riil yang tidak dipengaruhi oleh fluktuasi (tidak tetap) harga. Total PDRB atas harga konstan di kota bandar lampung dari tahun 2006-2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.5**  
**Total PDRB Kota Bandar Lampung Atas Dasar Harga Konstan 2000**  
**Tahun 2006-2015 (juta rupiah)**

No	Lapangan usaha	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertanian	231.358	238.175	247.577	252.686	257.527	262.576	267.984	273.599	1.426.770	1.460.081
2	Pertambangan & penggalian	75.905	74.714	78.885	80.065	82.616	85.284	88.244	90.338	157.641	184.396
3	Industri pengolahan	918.547	1.014.690	1.064.499	1.144.736	1.204.464	1.270.017	1.345.287	1.416.090	1.791.082	1.981.801
4	Listrik, gas, & air bersih	35.319	37.919	39.050	39.618	40.636	41.743	42.914	44.087	46.147	49.532
5	Bangunan	396.438	419.001	445.025	451.126	472.017	488.366	508.730	530.383	582.337	5.98.066
6	Perdagangan, hotel & restoran	972.055	999.763	1.037.250	1.005.692	1.097.399	1.142.003	1.189.185	1.249.161	1.465.089	1.501.562
7	Pengangkutan & komunikasi	821.273	849.185	890.121	952.344	1.015.909	1.085.907	1.164.349	1.235.433	1.395.006	1.476.154
8	Keuangan, persewaan & JS. PRSH	842.867	997.416	1.159.261	1.298.269	1.462.349	1.651.462	1.839.099	2.046.676	2.243.584	2.362.349
9	Jasa-jasa	785.284	795.92	840.638	876.531	907.602	940.493	977.576	1.019.799	1.167.4654	1.208.976
PDRB		5.079.047	5.426.158	5.802.307	6.151.068	6.540.521	6.967.851	7.423.369	7.905.567	8.475.205	9.010.634

*Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung Tahun 2018*

Berdasarkan tabel 4.2, total PDRB kota Bandar Lampung atas dasar harga konstan dari tahun 2006-2015 terus meningkat. Meskipun peningkatan setiap tahunnya tidak terlalu banyak tetapi PDRB kota Bandar Lampung terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Seperti pada tabel 4.5 pada tahun 2008 total PDRB atas harga konstan sebesar Rp. 5.802.307 hingga sampai dengan tahun 2015 meningkat sebesar Rp. 9.010.634.

### **c. Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran pemerintah merupakan pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap barang dan jasa. Pengeluaran atau belanja pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui peningkatan pelayanan publik. Sebagai ibu kota provinsi Lampung, kota Bandar Lampung memiliki pengeluaran/belanja pemerintah daerah yang cukup besar. Pengeluaran pemerintah itu dapat berupa belanja langsung dan belanja tidak langsung. Adapun total pengeluaran pemerintah kota Bandar Lampung dari tahun 2006-2015 sebagai berikut :

**Tabel 4.6**  
**Total Pengeluaran Pemerintah Kota Bandar Lampung**  
**Tahun 2006-2015 (dalam rupiah)**

Tahun	Total pengeluaran pemerintah
2006	564.988.592.643
2007	652.956.782.605
2008	778.777.514.052
2009	802.095.631.362
2010	928.170.641.481
2011	1.154.628.593.735
2012	1.464.988.926.884
2013	1.779.859.865.268
2014	1.779.475.905.415
2015	1.757.419.863.235

*Sumber : badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung Tahun 2018*

Tabel 4.6 menjelaskan bahwa total pengeluaran pemerintah kota bandar lampung selama sepuluh tahun terakhir yaitu dari tahun 2006-2015. Pengeluaran pemerintah kota bandar lampung terus meningkat setiap tahunnya yaitu pada tahun 2008 sebesar Rp. 778.777.514.052 dan terus meningkat sampai dengan tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 1.779.475.905.415. Sedangkan pada tahun 2015 pengeluaran pemerintah di kota bandar lampung mengalami penurunan menjadi Rp. 1.757.419.863.235. Turunnya pengeluaran pemerintah pada tahun 2015 disebabkan menurunnya belanja langsung dan tidak langsung dan menyebabkan tidak terealisasinya target yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian adanya ketidaktercapaian program dan kegiatan

pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya karena disebabkan adanya beberapa faktor-faktor internal pemerintah daerah.

### **B. Analisis data**

Analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda. Analisis regresi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen baik secara parsial maupun secara simultan.

Data dalam penelitian ini menggunakan data time series yang diambil dari kurun waktu 10 tahun yaitu tahun 2006 sampai dengan tahun 2015 dengan rincian data sebagai berikut :

**Tabel 4.7**  
**Data Olah Regresi Berganda Pada Penelitian**

LAPORAN DATA UNTUK OLAH EIEWS					DATA YANG DI LN (LOGARITMA NATURAL)			
NO	TAHUN	X1	X2	Y		X1	X2	Y
1	2006	564.988.592.643	5.079.047	46.137.259.170		27,0600714	15,4406342	24,5548867
2	2007	652.956.782.605	5.426.158	53.714.914.762		27,2047768	15,50674189	24,7069565
3	2008	778.777.514.052	5.802.307	67.661.519.022		27,3809912	15,57376616	24,9377835
4	2009	802.095.631.362	6.151.068	70.432.264.168		27,4104937	15,63213628	24,9779173
5	2010	928.170.641.481	6.540.521	86.692.399.700		27,5564814	15,69352738	25,1856321
6	2011	1.154.628.593.735	6.967.851	162.772.590.332		27,7747998	15,75681741	25,8156199
7	2012	1.464.988.926.884	7.423.369	298.696.062.085		28,0128688	15,82014356	26,4226924
8	2013	1.779.859.865.268	7.905.567	360.698.350.131		28,2075557	15,88307775	26,6113079
9	2014	1.779.475.905.415	8.475.205	394.646.889.446		28,20734	15,9526554	26,7012573
10	2015	1.757.419.863.235	9.010.634	397.547.326.856		28,1948679	16,01391599	26,7085798

KET X1 : Pengeluaran Pemerintah  
X2 : PDRB  
Y : PAD



# **1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung pada tahun 2006-2015**

## **a. Hasil Uji Asumsi Klasik**

### **1) Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Jika  $\text{sig} > 0,05$  maka data berdistribusi normal, jika  $\text{sig} < 0,05$  maka data tidak berdistribusi secara normal.

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Normalitas Pengeluaran Pemerintah dan PDRB Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bandar Lampung**

Sampel	Jarque – Bera	Probability	Simpulan
10	0,510145	0,774860	Data berdistribusi normal

*Sumber : output eviews 9 data di olah 2018*

Hasil output eviews pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa hasil *jarque-bera* sebesar 0,510145 ( $<1$ ) dan nilai *probability* sebesar atau 0,774860 ( $>5\%$ ) maka dapat diartikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

### **2) Uji Mutikolinearitas**

Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat apakah terdapat gangguan atau tidak terhadap data di mana multikolinearitas terjadi apabila ada korelasi antar variabel independen. Dengan demikian

uji ini dilakukan agar data yang ada harus terbebas dari gangguan multikolinearitas.

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Multikolienaritas Pengeluaran Pemerintah dan PDRB Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bandar Lampung**

Variabel	VIF	Simpulan
Pengeluaran pemerintah (X1)	5,01088	Tidak Terjadi multikolinearitas
PDRB (X2)	5,01088	Tidak Terjadi multikolinearitas

*Sumber : output eviews 9 data di olah 2018*

Hasil uji multikolinearitas yang ditunjukkan tabel diatas dengan melihat nilai VIF (*variance inflation factor*), output eviews menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi memiliki nilai VIF 5,01088 lebih kecil dari 10, maka dapat diartikan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

### 3) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear ada korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk mendeteksi autokorelasi dalam penelitian maka digunakan uji runs test. Apabila nilai sig > 0,05 maka dapat dikatakan lolos uji autokorelasi, dan apabila nilai sig < 0,05 maka tidak lolos uji autokorelasi.

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Autokorelasi Pengeluaran Pemerintah dan PDRB**  
**Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bandar Lampung**

Sampel	Variabel	Prob. Chi – Square	Simpulan
10	X1 dan X2	0,5601	tidak mengandung masalah autokorelasi

*Sumber : output eviews 9 data di olah 2018*

Hasil output eviews pada tabel 4.6 menunjukkan nilai Prob. Chi – Square sebesar 0,5601 atau lebih dari 5% (  $> 5\%$  ) maka dapat diartikan bahwa data yang digunakan tidak mengandung masalah autokorelasi.

#### 4) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan *variance residual* pada suatu periode pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Tabel 4.11**  
**Hasil uji heteroskedastisitas Pengeluaran Pemerintah dan PDRB**  
**Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bandar Lampung**

Sampel	Variabel	Prob. Chi – Square	Simpulan
10	X1 dan X2	0,6987	Tidak mengandung masalah heteroskedastisitas

*Sumber : output eviews 9 data di olah 2018*

Hasil output eviews pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa Prob. Chi – Square sebesar 0,6987 atau lebih besar dari 5% (  $> 5\%$  ) maka dapat dikatakan bahwa data yang digunakan tidak mengandung masalah heteroskedastisitas.

### b. Analisis Regresi Linear Berganda

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Variabel	Prediksi	Koefesien	T hitung	Signifikansi	Simpulan
C		-28,00539	-5,703516	0,0007	
Pengeluaran pemerintah (X1)	Positif	2,210539	4,658164	0,0023	Diterima
PDRB (X2)	Negatif	-0,481107	-0,444377	0,6702	Ditolak
<i>Adjusted R-Squared</i>	0,980141				
f-statistic	223,0921				
Signifikansi	0,000000				

Sumber : Output Eviews 9 Data di Olah 2018

Formulasi persamaan regresi berganda dari variabel pengeluaran pemerintah dan PDRB adalah :

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e$$

$$Y = (-28,00539) + 2,210539 X_1 + (-0,4811107) X_2$$

Dimana :

a = Konstanta (-28,00539)

$b_1$  = 2,210539

$X_1$  = Pengeluaran pemerintah

$b_2$  = (-0,4811107)

$X_2$  = PDRB

Koefesien-koefesien persamaan regresi linear berganda diatas dapat diartikan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa nilai konstanta (a) sebesar (-28,00539) menyatakan bahwa jika pengeluaran pemerintah dan PDRB dianggap sama dengan 0 maka besarnya rata-rata pendapatan asli daerah (PAD) adalah -28,00539%.
- 2) Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa nilai koefesien regresi Pengeluaran Pemerintah sebesar 2,210539, artinya jika PDRB mengalami kenaikan 1%, maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 2,210539% koefesien bernilai positif berarti terjadi hubungan yang searah antara Pengeluaran Pemerintah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka apabila nilai Pengeluaran Pemerintah meningkat maka nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga meningkat.
- 3) Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan nilai koefesien regresi untuk PDRB sebesar(-0,4811107), artinya PDRB mengalami kenaikan 1%, maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar -0,4811107%, dan koefesien bernilai negatif berarti terjadi hubungan yang berlawanan antara PDRB dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka apabila nilai PDRB meningkat maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga turun.

### c. Hasil Uji Hipotesis

#### 1) Uji Signifikansi Parsial (uji T)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi pada Pengeluaran Pemerintah dan PDRB, berpengaruh positif dan signifikansi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil pengujian ini dapat dilihat pada tabel di atas. Sebelum diketahui hasil uji hipotesis yang di terima atau di tolak, untuk itu di tentukan  $T_{tabel}$  dengan signifikansi 5% (0,05) dengan uji satu arah dan derajat keabsahan  $df = n-k-1$  atau  $df=10-2-1=7$  diperoleh  $T_{tabel}$  sebesar 1,89458. Hasil uji secara parsial Untuk Pengeluaran Pemerintah dan PDRB dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel 4.13**  
**Hasil uji T untuk Pengeluaran Pemerintah dan PDRB**  
**terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Variabel	Prediksi	Koefesie	T hitung	Signifikansi	Simpulan
Pengeluaran pemerintah (X1)	Positif	2,210539	4,658164	0,0023	Diterima
PDRB (X2)	Negatif	-0,481107	-0,444377	0,6702	Ditolak

*Sumber : Output Eviews 9 Data di Olah 2018*

Hasil uji signifikansi untuk uji parsial (uji T) pada variabel Pengeluaran Pemerintah menghasilkan  $T_{hitung}$  sebesar 4,658164 dengan  $T_{tabel}$  sebesar 1,89458, yang berarti  $T_{hitung} > T_{tabel}$ , serta di dapat nilai signifikansi sebesar 0,0023 atau lebih kecil dari 0,05 (5%) sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  diterima yang berarti

pengeluaran pemerintah (X1) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (Y) selama periode 2006-2015.

Variabel PDRB dimana hasil output eviews menunjukkan  $T_{hitung}$  sebesar (-0.444377) dan  $T_{tabel}$  1,89458 yang berarti  $T_{hitung} < T_{tabel}$ , serta didapat nilai signifikansi sebesar 0,6702 atau lebih besar dari 0,05 (5%) sehingga dapat dijelaskan bahwa PDRB (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y). Hasil penelitian bernilai positif berarti terjadi hubungan positif antara variabel PDRB dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika semakin besar PDRB kota Bandar Lampung maka semakin meningkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bandar Lampung. Sebaliknya, jika semakin kecil penerimaan PDRB maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bandar Lampung mengalami penurunan.

## **2) Uji Signifikansi Simultan (uji F)**

Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas (Pengeluaran Pemerintah dan PDRB) secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel terikat. Sebelum diketahui hasil uji hipotesis yang diterima atau ditolak, untuk itu ditentukan  $F_{tabel}$  dengan signifikansi 5% (0,05) dengan uji satu arah dengan derajat kebebasan  $df = k (n-1)$   $F(2,9)$  atau diperoleh  $F_{tabel}$  sebesar 4,26.

**Tabel 4.14**  
**Hasil uji F untuk Pengeluaran Pemerintah dan PDRB**  
**terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Adjusted square	R-	F – statistic	Signifikansi	Simpulan
0.980141		223,0921	0,000000	Diterima

*Sumber : output eviews 9 data di olah 2018*

. Berdasarkan hasil uji diperoleh untuk  $F_{hitung}$  sebesar 223,0921 dan diketahui  $F_{tabel}$  sebesar 4,26  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dengan signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000000 atau kurang dari 0,05 (5%) maka hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti Pengeluaran Pemerintah (X1) dan PDRB (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

### 3) Uji koefesien determinasi ( $R^2$ )

Uji koefesien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefesien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menunjukkan variabel-variabel dependen terbatas. Artinya uji ini dilakukan untuk mengetahui seberapa bebas mempengaruhi variabel terikat.

Berdasarkan output eviews menunjukkan nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,980141 atau 98,0141%, sehingga dapat diartikan bahwa Pengeluaran Pemerintah dan PDRB mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 98,0141%. Sisanya sebesar 1,9859% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.



Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan regresi linear berganda menggunakan uji parsial (uji T) diperoleh hasil  $T_{hitung}$  dari variabel Pengeluaran Pemerintah menghasilkan nilai sebesar 4.658164 dan diketahui bahwa nilai  $T_{tabel}$  sebesar 1,89458, yang berarti  $T_{hitung} > T_{tabel}$ , serta di dapat nilai signifikansi sebesar 0,0023 atau lebih kecil dari 0,05 (5%) sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengeluaran Pemerintah (X1) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y) selama periode 2006-2015.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak yang berarti variabel Pengeluaran Pemerintah dalam penelitian ini memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Bandar Lampung tahun 2006-2015.

Hasil penelitian ini diperkuat kembali dengan landasan teori yang dijelaskan wagner mengenai Pengeluaran Pemerintah yang semakin besar dalam pendapatan perkapita meningkat, secara relatif meningkatkan pengeluaran. Didukung dengan teori peacock dan wiseman juga bahwa pemerintah memiliki peran sebagai katalisator dan fasilitator sehingga membutuhkan anggaran belanja untuk melaksanakan pembangunan. Pengeluaran tersebut digunakan untuk administrasi pembangunan dan sebagian lain untuk kegiatan pembangunan di berbagai jenis infrastruktur yang penting. Sehingga pembelanjaan-pembelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi kegiatan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini sejalan dengan teori yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hubungan pengeluaran pemerintah dengan pendapatan asli daerah sangat jelas, apabila Pengeluaran Pemerintah digunakan untuk penyediaan barang publik dengan cara melakukan pembangunan. Hal ini dapat meningkatkan kegiatan ekonomi daerah tersebut. Meningkatkan kegiatan ekonomi membuat pemerintah akan mengenakan pajak dan retribusi sehingga memberikan sumbangan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## **2. Pengaruh PDRB Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Tahun 2006-2015**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda menggunakan uji parsial (uji T) diperoleh hasil  $T_{hitung}$  untuk variabel PDRB sebesar  $(-0,444377)$  dan diketahui  $T_{tabel}$  sebesar 1,89458 yang berarti  $T_{hitung} < T_{tabel}$ , serta di dapat nilai signifikansi sebesar 0,6702 atau lebih besar dari 0,05 (5%) sehingga dapat disimpulkan bahwa PDRB ( $X_2$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) ( $Y$ ).

Perkembangan PDRB di Kota Bandar Lampung dapat dikatakan cukup baik meskipun peningkatannya tidak terlalu tinggi setiap tahunnya tetapi PDRB di kota Bandar Lampung terus meningkat dari tahun 2006-

2015. Sehingga dengan begitu dapat mencerminkan pendapatan perkapita dan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung yang ikut meningkat pula.

Jika secara teori hubungan antara PAD dan PDRB merupakan hubungan secara fungsional, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan fungsi dari PDRB. Dimana semakin meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan melalui pajak dan retribusi daerah. Akan tetapi hal ini berbeda dengan keadaan Kota Bandar Lampung, dimana PDRB tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka hal ini mengasumsikan tentang bagaimana kepatuhan masyarakat Kota Bandar Lampung dalam membayar pungutan pajak dan retribusi daerah serta bagaimana kebijakan pemerintah daerah Kota Bandar Lampung dalam penetapan kebijakan pembayaran pajak beserta ketetapan tarif pajaknya. Dimana keadaan hasil perbandingan pajak daerah dan retribusi daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

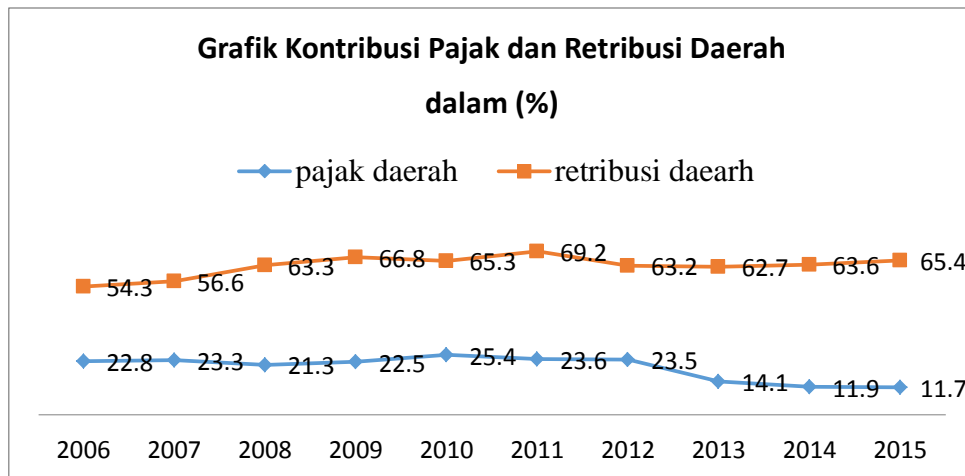
**Tabel 4.15**  
**Total penerimaan PAD dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di**  
**Kota Bandar Lampung**  
**Tahun 2006-2015 (dalam rupiah)**

Tahun	Pajak daerah	Retribusi daerah	Pendapatan asli daerah
2006	25.068.634.510	10.526.791.488	46.137.259.170
2007	30.411,161.966	12.533.404.985	53.714.914.762
2008	42.841.374.876	14.414.767.716	67.661.519.022
2009	47.035.295.283	15.849.094.531	70.432.264.168
2010	56.627.114.786	21.991.781.739	86.692.399.700
2011	112.602.140.715	68.252.030.150	162.772.590.332
2012	183.436.575.291	38.431.095.234	298.696.062.085
2013	242.655.037.332	50711.105.897	360.698.350.131
2014	246.655.037.332	42.924.715.312	394.646.889.446
2015	258.451.264.949	46.235.943.510	397.547.326.856

*Sumber : Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2018*

Tabel 4.15 terlihat bahwa pajak dan retribusi daerah di Kota Bandar Lampung selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun jika kita jabarkan dan amati lebih lanjut, presentase perbandingan antara pajak daerah dan retribusi daerah jika dibandingkan dengan penerimaan PAD setiap tahunnya, dapat dilihat dari grafik berikut ini :

**Grafik 4.1**  
**Grafik Perbandingan Kontribusi Antara Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD di Kota Bandar Lampung**



*Sumber : Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2018 (Data Diolah).*

Grafik 4.1 dapat kita lihat bahwa presentase hasil perbandingan pajak dan retribusi daerah di Kota Bandar Lampung mengalami naik turun dari tahun ke tahunnya. Meskipun mengalami kenaikan namun kenaikannya hanya beberapa persen dan relative kecil. Sedangkan presentase hasil perbandingan retribusi daerah di kota bandar lampung dalam mendukung penyusunan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari tahun 2006-2010 mengalami kenaikan dan penurunan dan pada tahun 2011-2015 terus mengalami penurunan.

Hasil analisis ini menjelaskan mengapa variabel PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kota Bandar Lampung. Pasalnya pajak dan retribusi daerah dalam penyusunan PAD di Kota

Bandar Lampung lebih banyak mengalami penurunan akan tetapi PDRB nya selalu meningkat setiap tahunnya. Sedangkan pendapatan perkapita di Kota Bandar Lampung lima tahun terakhir terus meningkat yaitu pada tahun 2011 sebesar 26,72 dan pada tahun 2015 menjadi 31,69. Yang memungkinkan bahwa kondisi inilah yang menyebabkan variabel PDRB yang seharusnya berpengaruh positif terhadap penerimaan PAD, menjadi tidak berpengaruh karena masih belum meratanya pembangunan sarana dan prasarana atau infrastruktur yang ada di Kota Bandar Lampung untuk pemungutan yang masih kurang tertib dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah sehingga berdampak pada berkurangnya atau belum tercapainya target penerimaan pajak dan retribusi daerah.

### **3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan PDRB Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung tahun 2006-2015 Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap PAD secara parsial menunjukkan berpengaruh signifikan pada Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung, sedangkan PDRB menurut hasil penelitian peneliti mempunyai tidak berpengaruh yang signifikan pada Pendapatan Asli daerah Kota Bandar Lampung. Secara data Pengeluaran Pemerintah kota Bandar Lampung setiap tahunnya meningkat dan lebih besar dari Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung. Penyelenggaraan

otonomi daerah yang sehat menurut kaho, hanya tercapai apabila sumber utama keuangan daerah berasal dari PAD atau paling tidak pembiayaan rutinnya di ditutupi oleh hasil PAD. Namun hal ini tidak terajadi pada Kota Bandar Lampung dimana Pengeluaran Pemerintah lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung, maka hal ini Kota Bandar Lampung mempunyai anggaran yang defisit.

Pengeluaran pemerintah Kota Bandar Lampung digunakan untuk pembangunan masyarakat, dalam Ekonomi islam menyatakan bahwa pembangunan merupakan kegiatan yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dibutuhkan dana, dimana dana tersebut didapat dari penerimaan pemerintah yang direalisasikan melalui kegiatan publik agar dapat terlaksana kegiatan pembangunan tersebut pemerintah harus mampu mengoptimalkan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja dengan baik. Islam berpendapat bahwa untuk mencapai suatu kesejahteraan (*falah*) tugas pemerintah haruslah dapat menjamin kepentingan sosial masyarakatnya dengan cara memenuhi kepentingan publik untuk rakyatnya.

Kota Bandar Lampung dimana penerimaan daerah yang diperoleh selain dari dana bantuan daerah pusat, tetapi bersumber pula dari pajak dan retribsui daerah yang terealisasi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun pengeuluran pemerintah Kota Bandar Lampung lebih besar dibandingkan dengan penerimaan daerah hal ini menandakan

bahwa pemerintah Kota Bandar Lampung belum dapat memenuhi pengeluaran yang digunakan untuk pembangunan masyarakat dengan dana keuangan publik yang berasal dari PAD, dalam hal ini pemerintah Kota Bandar Lampung masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

PDRB dalam pembahasan ekonomi islam dapat dijadikan suatu ukuran untuk kesejahteraan melalui pendapatan perkapita masyarakat dengan menggunakan parameter *falah* di dalamnya. Dimana *falah* adalah kesejahteraan yang sebenar-benarnya dan komponen-komponen rohaniyah masuk ke dalam pengertian *falah* ini. Maka dari itu, selain memasukkan unsur *falah* dalam menganalisis kesejahteraan, perhitungan pendapatan nasional /GDP riil berdasarkan islam juga harus mampu mengenali bagaimana interaksi instrumen-instrumen wakaf, zakat, dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hubungan PDRB dengan pendapatan asli daerah (PAD) dalam pandangan ekonomi islam jauh berbeda dengan penjelasan teori dalam ekonomi konvensional, dalam ekonomi islam peningkatan PDRB dapat mempengaruhi pendapatan setiap masyarakat sehingga akan berdampak pula terhadap penerimaan zakat maupun pajak lainnya sehingga penerimaan pemerintah ikut meningkat. Dengan demikian dapat dengan mudah untuk mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya (*falah*) karena tujuan utama dalam ekonomi islam adalah mencapai kesejahteraan dan kemenangan umat sehingga apabila PDRB di suatu daerah



tersebut tinggi maka pendapatan masyarakatnya pun ikut meningkat. Dari pendapatan masyarakat tersebut dapat mendorong tercapainya realisasi penerimaan negara melalui pajak maupun zakat. Dan seperti dijelaskan dalam Q.S At-Taubah (9) : 29) yaitu :

قَتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya : “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula beriman kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan rasulnya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), yaitu orang-orang yang diberikan al-kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah (Pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”. (Q.S At-Taubah (9):29)<sup>105</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan setiap umatnya untuk membayar pajak (*jizyah*) dengan patuh. Hal ini berkaitan dengan pengoptimalan keuangan publik karena pajak merupakan salah satu indikator dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Apabila masyarakat bertanggung jawab dan patuh dalam membayar pajak maupun zakat maka penerimaan pemerintah yang didedikasikan guna pembangunan ekonomi dapat terealisasi dengan baik dan berkelanjutan. Pengoptimalan keuangan publik ini agar terjadi distribusi yang merata sehigga terciptanya kesejahteraan dalam masyarakat.

---

<sup>105</sup> Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Tajwid & Terjemah (Bandung :Diponegoro, 2014), h. 152

Meningkatnya PRDB di negara-negara islam akan memberikan dampak yang baik dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan negara maupun pendapatan daerah seperti zakat, kharraj, sedekah dan lainnya dikarenakan ikut meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian yang dilakukan di Kota Bandar Lampung pada tahun 2006-2015 bahwa PDRB tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan PAD. Hal ini mengasumsikan kurangnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan kewajiban setiap masyarakat sebagai wajib pajak sehingga dengan peristiwa tersebut akan berdampak terhadap kesejahteraan dan keadilan di masyarakat karena masyarakat yang memiliki pendapatan yang tinggi enggan untuk membayar pajak dan retribusi sehingga pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk pemeratakan distribusi pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus terhambat dan kurang optimal. Melihat pendapatan perkapita masyarakat Kota Bandar Lampung menggunakan PDRB atas harga konstan tahun dasar 2010 maka sebesar 31,52 pada tahun 2015 dan UMK (upah minimum kabupaten) Kota Bandar Lampung pada tahun 2015 sebesar 1.649.500, menunjukkan bahwa pendapatan perkapita penduduk Kota Bandar Lampung juga meningkat dari tahun sebelumnya, sehingga dapat mempengaruhi penerimaan PAD. Tetapi kurangnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah menyebabkan tidak berpengaruhnya PDRB terhadap PAD.

Pengalokasian sumber penerimaan terhadap pengeluaran tidak serta merta dilakukan untuk pengeluaran tersebut. Ada aturan dalam mengelola sumber pendapatan dan pengeluaran, semua telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan hukumnya masing-masing. Seperti dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 59 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S An-Nisa :59)

Ayat diatas menjelaskan bahwa sebagai umat Allah berhak untuk mematuhi segala jenis peraturan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai ulul amri atau pemimpin negara kita. Serta pemerintah atau pemimpin pula berhak membuat kebijakan yang mendorong untuk terciptanya kesatuan dan kemakmuran rakyatnya. Sehingga pemerintahan berhak untuk mengambil zakat dari masyarakatnya yang memiliki harta lebih dan kemudian dikekola *baitul mal*, kemudian dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Setiap pos pemasukan di dalam *baitul mal* mempunyai mekanisme masing-masing untuk dikeluarkan atau dibelanjakan oleh negara, sehingga akan mempunyai dampak positif terhadap perekonomian negara dan masyarakat. Adapun pengeluaran pemerintah pada masa islam yaitu untuk pengetahuan, pembangunan infrstruktur, pembangunan armada perang, dan keamanan penyediaan layanan kesejahteraan sosial.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari hasil penelitian analisis Pengeluaran Pemerintah dan PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam perspektif Ekonomi Islam Kota Bandar Lampung tahun 2006-2015 adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji penelitian dengan menggunakan uji regresi linear berganda dapat dinyatakan bahwa Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung selama periode 2006-2015 dengan nilai signifikansi sebesar 0,0023 atau lebih kecil dari 0,05 (5%), dimana kurang lebih 95% Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam arti banyaknya pengeluaran pemerintah yang dilakukan akan mengurangi atau mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) kota bandar lampung pada tahun 2006-2015 dan sebaliknya apabila pengeluaran pemerintah di perkecil maka akan meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah (PAD).
2. Hasil uji untuk variabel PDRB dinyatakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung selama periode 2006-2015 dengan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,6702 atau lebih besar dari 0,05 (5%) artinya bahwa kurang lebih 95% pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli

Daerah (PAD). Sehingga dapat diasumsikan bahwa kurangnya kepatuhan masyarakat kota bandar lampung dalam membayar pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu penyumbangan penerimaan asli daerah.

3. Dalam ekonomi Islam keuangan publik yang baik apabila pengeluaran pemerintah daerah bisa ditutupi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun berbeda dengan hasil data dan penelitian bahwa Penerimaan daerah Kota Bandar Lampung yang diperoleh selain dari dana bantuan daerah pusat, tetapi bersumber pula dari pajak dan retribusi daerah yang terealisasi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun pengeluaran pemerintah Kota Bandar Lampung lebih besar dibandingkan dengan penerimaan daerah hal ini menandakan bahwa pemerintah Kota Bandar Lampung belum dapat memenuhi pengeluaran yang digunakan untuk pembangunan masyarakat dengan dana keuangan publik yang berasal dari PAD, dalam hal ini pemerintah Kota Bandar Lampung masih sangat bergantung pada dana transferan pemerintah pusat.

## **B. Saran**

pokok pikiran yang dapat dijadikan saran dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah daerah, khususnya BPS Kota Bandar Lampung bahwa Pengeluaran Pemerintah dan PDRB yang dilakukan oleh Kota Bandar Lampung sudah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung. Ada hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung yaitu bahwa Pemerintah perlu

meingkatkan pengawasan dan pembinaan serta perlu aktif dalam sosialisasi akan pentingnya membayar pajak dan retribusi.

2. Bagi peneliti selanjutnya, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebuah bahan referensi untuk kegiatan mengajarnya ataupun penelitiannya. Dikarenakan penelitian ini masih memiliki kekurangan seperti keterbatasan dalam memperoleh data dan periode waktu yang digunakan hanya 10 tahun. Sehingga peneliti selanjutnya diharapkan mampu meneliti dengan menambah variabel yang dapat memebrikan pengaruh pada pendapatan asli daerah (PAD) sehingga mampu memberikan hasil penelitian yang lebih baik lagi.
3. Bagi publik, dengan hasil penelitian ini diharapkan masyarakat juga dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak dan retribusi daerah, karena hal tersebut akan memberikan *feedback* (timbang balik) kepada masyarakat hasil pembangunan yang dilaukan pemerintah daerah dan tidak berlaku boros dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun indonesia bukanlah negara islam, tetapi masyarakatnya harus tetap memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak karena sudah menjadi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.K. Ahmad, Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, 2006
- Abdullah, Dri Asmawati, dan Febriansyah, “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Bagian Selatan*” *Jurnal Akuntansi FEB Universitas Bengkulu*, Vol 3, No. 1, (2015)
- Abid Muhtarom, “*Analisis PAD (Pendapatan Asli Daerah) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2010-2015*”, *Jurnal Ekonomi Universitas Islam Lamongan*, Vol. XIII, No. 1 (2015)
- Arsyad, Lincolin, “*Ekonomi Pembangunan Edisi 5*”, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2015)
- Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2015,  
[www.bandarlampungkota.bps.go.id](http://www.bandarlampungkota.bps.go.id)
- Bukhari, Ikhwan, “*Analisis Perbandingan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*” *Jurnal Akuntansi Universal Siliwangi* (2010)
- Chakim, Ali, “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun Tahun 1991-2010*”(Thesis Program studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2011)
- Daerah (PAD) Kabupaten Tabanan” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Universitas Tabanan*”, Vol. 13 No. 1 (2016)
- Darwin., MBP, “*Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*”, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2010)
- Djaenuri, Aries, “*Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Elemen-Element Penting Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*”, (Bogor :Ghalia Indonesia, 2012)
- Eni Aryanti, Iin Indarti, “*Pengaruh Variabel Makro Terhadap Pendapatan Asli Daerah Periode 2000-2009 Di Kota Semarang*” *Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis* Vol 1, No. 1 (2012), *Jurnal. Widyamanggala.ac.id*
- Ghozali, Imam, “*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program*” IBM SPSS (Edisi Kelima) (Semarang : Universitas Diponegoro, 2011)



- Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Prpgram IBM SPSS* (Semarang : Universitas Diponegoro, 2009)
- Halim, Abdul, *“Akuntansi Keuangan Daerah”*, Jakarta, 2001
- Halim, Abdul, *“Bunga Rampai Menejemen Keuangan Daerah”*, (Yogyakarta : UUP AMP YKPN, 2007)
- Halim, Abdul, Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta : Salemba Empat, 2012)
- Hasan, Iqbal, *“Analisis Data Penelitian Dengan Statistik”*, (Jakarta : Bumi Aksara.2008)
- Hidayanto, Fajar, *“Format Keuangan Publik Yang Islami”* Jurnal Ekonomi Islam, Vol/ IV, No. 1, Juli (2010)
- Ian Dwi Heruyanto, *“Analisis Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta”*, (Skripsi Program studi Ekonomi Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016)
- Kadir, *“Statistik Terapan (Konsep, Contoh dan Analisis Data Dengan Program SPSS/Lisrel Dalam Penelitian)”*, (Depok : Raja Grafindo Persada. 2015)
- Kaho Josep Riwu, *“Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhinya”* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
- Kamila, Aisyah, *“Pengaruh sektor pariwisata, Produk Domestik regional Bruto (PDRB), Tingkat Investasi dan Jumlah Penduduk Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2010-2014”* (Skripsi program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016)
- Karim, Adimarwan, *Ekonomi Makro Islam Edisi ke-3*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015)
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid & Terjemah* (Bandung :Diponegoro, 2014)
- Koentjoroningrat, *“Metode Penelitian Masyarakat”* (Jakarta : Gramedia,2010)  
LKPJ AMJ Walikota Bandar Lampung Thun 2010-2015
- Mangkoesebroto, Guritno, *“Ekonomi Publik”*, Edisi Ketiga, (Yogyakarta : BPFE, 2010)
- Mardiasmo, *“Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2011”*, (Yogyakarta : CV ANDI OFFSET, 2011)

- Michel P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, (Jakarta : Erlangga, 2006)
- Miragustia Mayza, Raja Masbar, Muhammad Nasir, “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh*” Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol. 3, No. 1 (2015)
- Mudrajat Kuncoro, Ph.D, *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*, (Jakarta : Erlangga, 2009)
- Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Edisi revisi ke 2, (Bandung : Raja Grafindo Persada, 2010)
- Nurdiwaty Diah, Badrus Zaman, Efda Kristinawati, “*Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Modal di Jawa Timur*”, Jurnal Aplikasi Bisnis, Vol. 17, No. 1 (2017)
- Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islam : Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta : Kencana, 2012)
- Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam Cetakan ke-1*, (Jakarta : Kencana, 2015)
- P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers. 2011)
- Putu Lia Perdana Sari, “*Analisis Vaariabel-Variabel yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali*” Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Vol 2, No. 3, (2013)
- Rahardjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011)
- Raharjo Adisasmita, *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah: Cetakan Pertama* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013)
- Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Makro Ekonomi, Edisi Ketiga*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan Kombinasi* (Bandung : Alfabeta, 2014)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif Kualitatif R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2016)

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif Dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2015)
- Umdatul Husna, “*Pengaruh PDRB, Inflasi, Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Se Jawa Tengah*” (Skripsi Program studi ekonomi pembangunan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2015)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat 7, [www.itjen.depkes.go.id](http://www.itjen.depkes.go.id)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 2, [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)
- Usman, Husnaini dan Setiadi, *Pengantar Statistika*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2003)
- V. Wiratna Sujarweni. *Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi. Cetakan Pertama* (Yogyakarta : Pustaka Baru Pers, 2015)
- Yani, Ahmad, “*Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*”, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013)
- Yeny Kurniawati Gitaningtyas, Taufik Kurrohman, 2014 “*Pengaruh Produk Domestic Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Dan Investasi Swasta Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur*”, Artikel Ilmiah Mahasiswa Universitas Jember.